



MAJALAH

Parlementaria

Politisasi Bansos di Masa Pemilu



Bantuan Sosial (Bansos) kembali jadi sorotan lantaran Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menggulirkan bantuan langsung tunai (BLT) menjelang Pilpres 2024 dan memakan anggaran yang cukup besar.

EDISI 230
TH. 2024



7 25272 73070 6





Biro Pemberitaan Parlemen

Parlementaria

PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH

Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

M. Ibnukhalid, S.Pd, (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos, (Kasubag Media Cetak dan Website)

Agus Budi Leksono, S.A.P (Kasubag Analisis Media)

Nita Juwita, S.Sos, (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Muhammad Husen, Ria Nur Mega, Agung Hidayat, Ridwan Budiman, S.I.P.

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Fadlun Banyah, Prima Danutirto, A.Md,
Andi Nurul Naual Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonaricha Fresta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Rumi Sari Budiati, Arief Rachman,
R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afrhillah, Geraldii Opie,
Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh. Farhan NF

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Sihahan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom,
M. Rizki Nugraha, Sunarya,
Fahmi Harfa, Safitri Restu Widjowati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan,
Intan Putri Suciani, Riska

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI
(GRATIS)

LAPORAN UTAMA



Politisasi Bansos di Masa-Pemilu

4

4

PROLOG

Politisasi Bansos di Masa Pemilu

6

LAPORAN UTAMA

Bansos Melejit di Masa Pemilu

- Bawaslu Harus Awasi Bansos
- Bansos Jadi Alat Politik Presiden
- Intimidasi Di Balik Bansos
- Antara Kebutuhan Rakyat dan Penguasa

16

SUMBANG SARAN

Perluakah Memperbesar Bansos pada 2025 ?

18

PENGAWASAN

Pajak Hiburan Ditinjau Ulang

20

ANGGARAN

Anggaran Stunting yang Tepat Sasaran

22

LEGISLASI

RUU Desa

Mengkompromikan Masa Jabatan Kepala Desa

24

FOTO BERITA

28

LENSA PARLE

Badai Partisipasi Menyambar Momentum Demokrasi

30

PROFIL

Supriansa

Sang Anak Petani

34

KUNKER



PENGAWASAN

**Pajak Hiburan
Ditinjau Ulang**

18

ANGGARAN

**Anggaran *Stunting*
yang Tepat Sasaran**

20

LEGISLASI

**RUU Desa
Mengkompromikan
Masa Jabatan
Kepala Desa**

22

- 56** **SOROTAN**
Pinjol Bidik Perguruan Tinggi
- 58** **LIPUTAN KHUSUS**
Mengundang AIPA,
Menyaksikan Pemilu Indonesia
- 60** **DAPIL**
- 70** **TOKOH**
BILLY MAMBRASAR
Putra Papua Pertama 'Penakluk' Harvard
- 72** **PERNIK**
Ketika Palu Godam Hujam Pagar Parlemen
- 74** **KIAT SEHAT**
Cegah Leptospirosis Saat Banjir
- 76** **WISATA**
Trip Pendek di Surabaya
- 78** **HOBI**
PUAN MAHARANI
Menikmati Alam dengan Trekking
- 79** **POJOK PARLE**
Sajak Pemilu

SCAN QR
UNTUK BERITA TERKINI
SEPUTAR DPR RI



Ikuti Akun Media Sosial DPR RI
Follow, Like & Subscribe
medsos@dpr.go.id

DPR RI
 DPR RI
 @dpr_ri
 @dpr_ri
 @dpr_ri
 @dpr_ri

www.dpr.go.id

Politisasi Bansos di Masa Pemilu

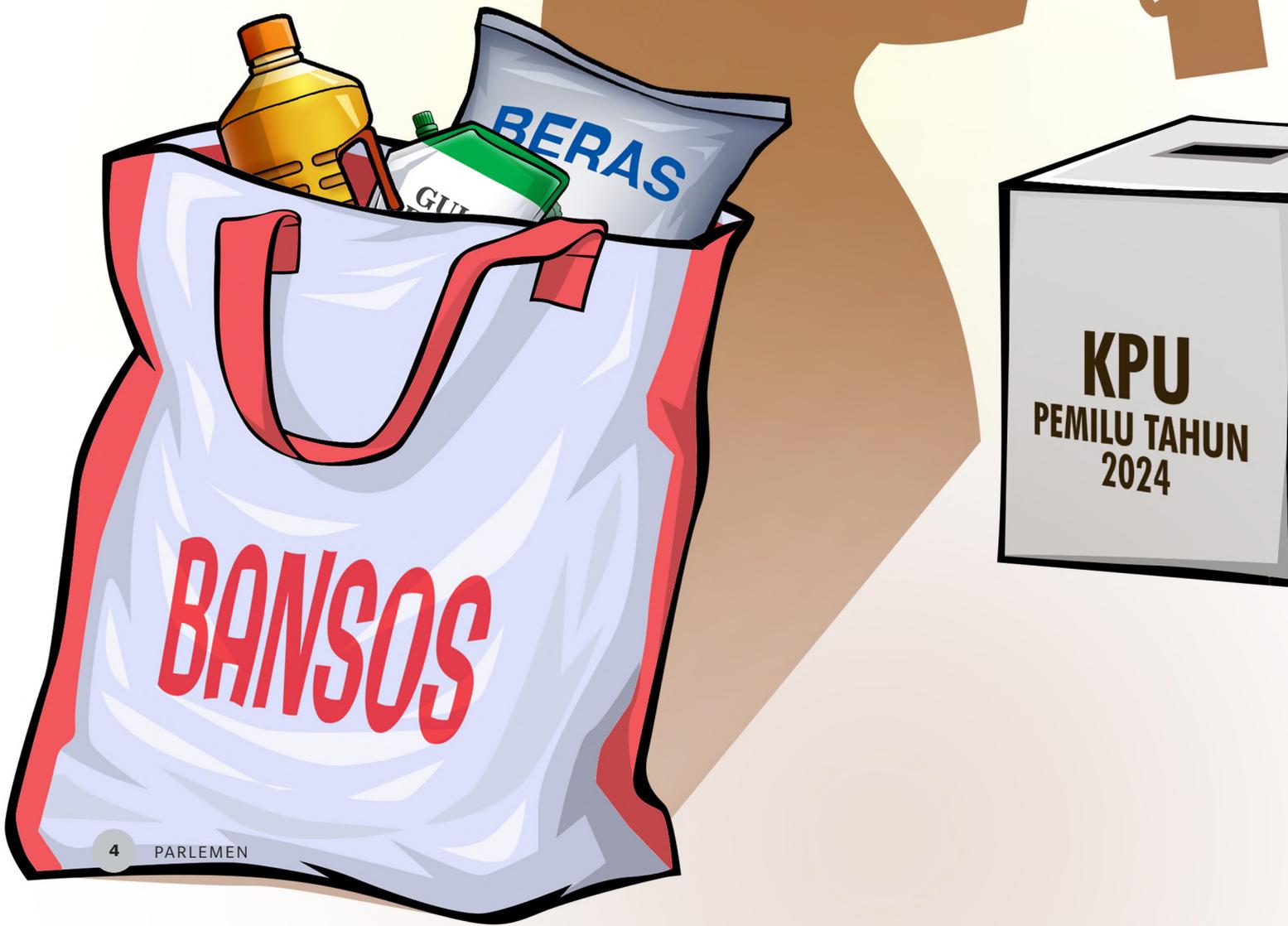
Bantuan Sosial (Bansos) kembali jadi sorotan lantaran Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menggulirkan bantuan langsung tunai (BLT) menjelang Pilpres 2024 dan memakan anggaran yang cukup besar.



FEBRUARI ini, Presiden Jokowi mengeluarkan program bansos berupa BLT dengan nama BLT Mitigasi Risiko Pangan.

Anggaran yang

dibutuhkan untuk bansos ini mencapai Rp11,2 triliun. Akan ada 18,8 juta orang yang akan menerima bansos sebanyak Rp600 ribu.





Sudah kita sampaikan September 2023 lalu sebagai akibat dampak el nino dan kenaikan harga beras, yang sangat sensitif terhadap rumah tangga miskin. Kebijakannya kita desain bersama di DPR. Pemerintah statusnya hanya menyalurkan kebijakan yang telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPR.

Said Abdullah
Ketua Badan Anggaran DPR RI

Pemberian BLT tersebut bertujuan mengantisipasi potensi gagal panen. Namun, sebagian pihak mengatakan hal tersebut menjadi langkah untuk mengambil simpati masyarakat di tengah pesta demokrasi dan aksi kampanye partai yang makin memanas jelang pemilu.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyorot serius soal ini. Ia mewanti-wanti kepada pemerintah agar penyaluran bansos tepat waktu dan tepat sasaran. Hal ini untuk menghindari politisasi bansos jelang pemilu. Sejatinnya mekanisme penyalurannya lewat Kemensos dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan sesuai tupoksi atas dasar perintah undang-undang.

Sebelumnya, disampaikan Said, dalam rencana anggaran, Banggar DPR bersama pemerintah telah menyetujui penebalan belanja bansos. Ia pun menjelaskan bansos adalah hak rakyat, karena dipungut dari pajak rakyat dan penghasilan

bukan pajak yang diterima negara dari kekayaan alam di Indonesia, bukan milik pemerintah.

"Sudah kita sampaikan September 2023 lalu sebagai akibat dampak el nino dan kenaikan harga beras, yang sangat sensitif terhadap rumah tangga miskin. Kebijakannya kita desain bersama di DPR. Pemerintah statusnya

hanya menyalurkan kebijakan yang telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPR," jelas Said.

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, tidak elok kalau pejabat pemerintah menyatakan program bansos merupakan kemurahan hati pemerintah. Tapi, sebaliknya bansos adalah hak rakyat yang wajib diberikan. Hal yang sama juga disampaikan Menkeu Sri Mulyani. Katanya, pemberian bansos merupakan instrumen yang sudah ada dalam APBN dan sudah disetujui semua partai politik di DPR.

"APBN itu adalah Undang-Undang. APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik di Senayan," kata Menkeu dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK, di kantor Kementerian Keuangan, dikutip awal Januari silam. Menkeu mencatat, alokasi bansos tahun ini sudah dianggarkan APBN 2024 senilai Rp496 triliun. Jumlah itu bertambah sekitar Rp20 triliun dibandingkan 2023.

Namun banyak pengamat melihat, bantuan-bantuan yang digelontorkan ini seperti kebijakan yang dipaksakan. Dikutip dari koran. tempo.co, Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono berpendapat, pemberian bantuan tunai 2023-2024 merupakan kebijakan yang dipaksakan karena direncanakan dan

dieksekusi dalam waktu yang sangat singkat.

"Presiden terlihat sedang mengejar ambisi politik jangka pendek melalui gelontoran bansos ad hoc tiada henti sejak tahun lalu hingga kini menjelang pilpres," katanya. Saat mengumumkan pemberian BLT, pemerintah beralasan terdapat potensi pelemahan daya beli masyarakat,



Presiden terlihat sedang mengejar ambisi politik jangka pendek melalui gelontoran bansos ad hoc tiada henti sejak tahun lalu hingga kini menjelang pilpres.

Yusuf Wibisono
Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas)

yang menghabiskan sekitar 60 persen pengeluarannya untuk pangan.

Namun, menurut Yusuf, risiko ini sudah relatif tertanggulangi oleh bansos reguler, seperti program keluarga harapan, bantuan pangan non-tunai, Kartu Indonesia Pintar, serta BLT Desa. Disamping itu, sepanjang 2023 pemerintah sudah menggulirkan berbagai program bansos tambahan, seperti bansos beras pada periode April-Desember 2023 dan BLT el nino pada November-Desember 2023.

Yusuf mengatakan, di tengah perekonomian yang diklaim semakin membaik, cakupan pemberian bansos seharusnya semakin kecil. "Prinsip dasar bansos adalah bersifat temporer dan akan dihentikan atau direlokasi ke penerima baru ketika penerima lama tidak lagi membutuhkannya," pungkasnya. **— tim laput**



Bansos Melejit di Masa Pemilu

Tak lazim, memang, bantuan sosial (bansos) melejit angkanya di masa kampanye pemilu. Dibading tahun-tahun sebelumnya bansos di masa Pemilu 2024 mencapai Rp496 triliun. Hampir mendekati Bansos di masa Covid-19 yang mencapai Rp498 triliun.



JUMLAH

anggaran bansos pada 2024 lebih besar 12,4 persen daripada tahun lalu yang mencapai Rp439,1 triliun. Bagi-bagi bansos di tengah

masifnya kampanye pemilihan calon presiden (pilpres) Januari-Februari 2024 lalu. Benarkah bansos diorientasikan untuk kepentingan pemberi bukan yang diberi?

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah, mewanti-wanti kepada pemerintah agar penyaluran bansos tepat waktu dan tepat sasaran. Hal ini untuk menghindari politisasi bansos jelang pemilu. Sejatinnya mekanisme penyalurannya lewat Kemensos dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan sesuai tupoksi atas dasar perintah undang-undang.

Disampaikan Said, dalam rencana anggaran, Banggar DPR bersama pemerintah telah menyetujui belanja bansos. Bansos adalah hak rakyat, karena dipungut dari pajak rakyat dan penghasilan bukan pajak yang diterima negara dari kekayaan alam Indonesia, bukan milik pemerintah.

"Sudah kita sampaikan September 2023 lalu sebagai akibat dampak el nino dan kenaikan harga beras, yang sangat sensitif terhadap rumah tangga miskin. Kebijakannya kita desain bersama di DPR. Pemerintah statusnya hanya menyalurkan kebijakan yang telah disepakati bersama antara



FOTO: TIM/NR
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah.

pemerintah dan DPR. Jadi, tidak elok kalau ada pejabat pemerintah, program bansos adalah belas kasihan atau kemurahan hati pemerintah. Namun, itu hak rakyat yang wajib diberikan," terang Said, Januari lalu.

Meski demikian, ia tetap menyoroti lonjakan belanja bansos yang disalurkan oleh pemerintah. Menurutnya, besarnya anggaran bansos yang mencapai lebih dari Rp400 triliun rentan penyalahgunaan dan dapat menimbulkan tendensi politis terutama apabila penyalurannya

diberikan di tengah tahun politik.

"Terus terang saja, melonjaknya anggaran bansos Rp496,8 triliun sungguh mengkhawatirkan dari sisi penyalahgunaan. Pada saat Covid-19 saja, di tahun 2020 anggaran perlindungan sosial hanya Rp234,33 triliun dan realisasinya Rp216,59 triliun," ungkapinya.

Selain membandingkan besaran bansos saat pandemi Covid-19 dengan besaran bansos terkini, politisi Fraksi PDI Perjuangan ini juga mempertanyakan ketidakterlibatan



Kemensos dalam pembahasan dan penyaluran bansos. Padahal, Kemensos merupakan kementerian teknis yang erat kaitannya dengan bansos. "Kenapa anggaran bansos melonjak drastis, bahkan tidak melibatkan kementerian sosial sebagai kementerian teknisnya?" tanya Said.

Lebih jauh, ia mengungkapkan keprihatinannya lantaran banyak sektor pembangunan yang terkena "pemotongan" anggaran. Diindikasikan anggaran tersebut dialihkan untuk memperkuat anggaran bansos. Padahal, menurutnya, anggaran pembangunan itu bisa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur, dan meningkatkan perumahan rakyat.

“

Jangan jadikan rakyat miskin kita sebagai dalih untuk mengeruk suara pemilu, seolah-olah tampil bak Robin Hood membagi-bagi sembako dan uang tunai tanpa perencanaan yang matang. Padahal, cara-cara seperti itu tidak akan mengentaskan rakyat miskin keluar dari kubangan kemiskinan, tetapi hanya menjadikan orang miskin sebagai kendaraan politik.

Said Abdullah
Ketua Badan Anggaran DPR RI

Selain itu, bisa untuk menguatkan kemandirian pangan, energi, meningkatkan industri dan daya saingnya, meningkatkan ekspor, meningkatkan SDM melalui pendidikan, kesehatan, dan budaya, menghapuskan kemiskinan ekstrem, serta pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara. Selain pengucurannya dicurigai diboncengi kepentingan elektoral karena dilakukan pada bulan pemungutan suara, kemunculan tiba-tiba bansos baru ini dinilai berpotensi membuat tata kelola kas negara menjadi tak sehat.

"Saya harapkan APBN 2024 ini kita jaga dengan sebenar-benarnya agar sesuai tujuannya. Biarkanlah pemilu ini berjalan secara alamiah, sedemokratis mungkin, berjalan tanpa cawe-cawe kekuasaan. Dari pemilu demokratis, pemenang pemilu akan memiliki legitimasi yang kuat memimpin Indonesia. Sebaliknya Indonesia bisa dikucilkan dari pergaulan internasional jika demokrasinya gagal," tutur Said yang juga Anggota Komisi XI DPR RI.

Said menegaskan bahwa program bansos hanya akan tepat sasaran dan memiliki manfaat optimal bagi pengentasan rumah tangga miskin apabila dikerjakan oleh tangan-tangan teknokrasi yang bekerja sesuai perencanaan, profesional, berintegritas, dan tidak ada tunggangan politik. Ia pun menekankan agar tidak menjadikan rakyat miskin sebagai aset elektoral.

"Jangan jadikan rakyat miskin kita sebagai dalih untuk mengeruk suara pemilu, seolah-olah tampil bak Robin Hood membagi-bagi sembako dan uang tunai tanpa perencanaan yang matang. Padahal, cara-cara seperti itu tidak akan mengentaskan rakyat miskin keluar dari kubangan kemiskinan, tetapi hanya menjadikan orang miskin sebagai kendaraan politik," kilahnya. **we/mh**

Bawaslu Harus Awasi Bansos

Di masa kampanye pemilu, sebelum hari penyoblosan, pemerintah rajin mendistribusikan bantuan sosial (bansos). Ada kepentingan politik di balik bansos? Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mesti turun tangan mengawasi.



KEKHAWATIRAN

muncul bahwa masifnya distribusi bansos bagi rakyat miskin hanya untuk kepentingan pemerintah. Inilah yang banyak

dikritik publik. Apalagi, distribusi bansos itu tak menyertakan otoritas Kementerian Sosial (Kemensos). Wajar bila kemudian muncul penilaian, bansos hanya untuk kepentingan paslon capres-cawapres tertentu.

Pengelolaan bansos yang berasal dari APBN, memang perlu pengawasan ketat, apalagi dibagikan saat semua partai politik sedang sibuk memenangkan kontestasi pada Pemilu 2024. Inilah yang disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati kepada *Parlementaria*, awal Februari lalu. Bawaslu harus turun tangan mengawasi dengan cermat setiap pergerakan distribusi bansos. Menurut Anis, potensi penyalahgunaannya besar sekali.

"Penyalurannya harus bersifat netral, karena jika dilihat dari besarnya jumlah KPM (keluarga penerima manfaat) yang mencapai 21,3 juta kepala keluarga atau jika dikali dua keluarga saja bisa mencapai 42,6 juta jiwa. Potensi suara yang sangat besar untuk memenangkan pasangan tertentu," katanya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu, menyerukan kepada parpol-parpol peserta pemilu pada 2024 ini mengawasi secara



Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati.

ketat pendistribusian bansos beras. Terutama, bagi parpol yang telah memiliki perwakilan di DPR RI, DPRD tingkat I, dan DPRD tingkat II. DPR, misalnya, bisa saja membentuk panitia kerja (Panja) bila sudah banyak bukti nyata penyalahgunaan distribusi bansos untuk kepentingan politik.

"Jika memang diperlukan, DPR RI bisa membentuk Panja bansos, guna memastikan semua proses penyalurannya berjalan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan," ungkap Wakil Ketua Badan Akuntabilitas

Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini.

Bila kelak terbentuk, Panja bisa melakukan pengecekan lapangan untuk melihat kesesuaian data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dengan keluarga penerima manfaat (KPM). "Akuntabilitas harus terjaga, jangan sampai terjadi exclusion dan inclusion error. Orang yang seharusnya dapat tetapi tidak menerima. Begitu pula sebaliknya, yang tidak pantas menerima tetapi menerima," kilhanya.

Anis menyebut fungsi kontrol dan pengawasan yang bisa berperan

“

Penyalurannya harus bersifat netral, karena jika dilihat dari besarnya jumlah KPM (keluarga penerima manfaat) yang mencapai 21,3 juta kepala keluarga atau jika dikali dua keluarga saja bisa mencapai 42,6 juta jiwa. Potensi suara yang sangat besar untuk memenangkan pasangan tertentu



secara efektif dalam penyaluran bansos ini adalah masyarakat. Sementara gerakan pantau bansos melalui media sosial harus terus digaungkan, agar potensi penyalahgunaan langsung bisa teridentifikasi dan diketahui pihak yang terlibat.

"Masyarakat bisa melihat secara langsung pendistribusi bansos ini tepat sasaran atau tidak. Mereka bisa memanfaatkan keberadaan media sosial untuk melaporkan penyalahgunaan bansos tersebut. Seperti yang sudah terjadi selama ini. Banyak kasus penyelewengan dan penyalahgunaan kewenangan yang terungkap melalui peran media sosial," tutupnya.

Dalam pagu anggaran perlindungan sosial (perlinsos) 2023 teralokasi Rp476 triliun. Pada 2024, naik Rp20,5 triliun menjadi Rp493,5 triliun. Pemerintah kembali berdalih penebalan bansos dilakukan untuk menjaga permintaan domestik bagi masyarakat miskin dan rentan,

mengingat dampak panjang yang ditimbulkan oleh fenomena el nino. Anis sekali lagi mengingatkan, program bansos ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik tertentu.

"Bawaslu di tahun politik ini, dengan seluruh instrumen

yang dimilikinya harus mulai mengantisipasi potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu, karena tujuan bansos itu meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujar politisi Fraksi PKS tersebut.

Anis menyebut, fungsi kontrol dan pengawasan yang bisa berperan efektif dalam penyaluran bansos ini adalah masyarakat. Sementara gerakan pantau bansos melalui media sosial harus terus digaungkan, agar potensi penyalahgunaan langsung bisa teridentifikasi dan diketahui pihak yang terlibat.

"Masyarakat bisa melihat secara langsung pendistribusi bansos ini tepat sasaran atau tidak. Mereka bisa memanfaatkan keberadaan media sosial untuk melaporkan penyalahgunaan bansos tersebut. Seperti yang sudah terjadi selama ini, banyak kasus penyelewengan dan penyalahgunaan kewenangan yang terungkap melalui peran media sosial," tutupnya. we/mh

“

Seperti yang sudah terjadi selama ini. Banyak kasus penyelewengan dan penyalahgunaan kewenangan yang terungkap melalui peran media sosial,

Anis Byarwati
Anggota Komisi XI DPR RI

Bansos Jadi Alat Politik Presiden?

Bansos (Bantuan sosial) sejatinya merupakan salah satu program pemerintah sebagai usaha untuk menyejahterakan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya kerap menimbulkan permasalahan, entah itu karena tidak tepat sasaran, data yang salah, atau mekanisme penyaluran yang tidak sesuai.



FOTO: FARHAN

Anggota Komisi VIII DPR RI | Komang Heri



BELAKANGAN program ini kembali menuai sorotan publik termasuk dari beberapa anggota DPR RI. Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Februari ini membagikan bantuan langsung tunai (BLT) jelang Pilpres 2024, yang dinamai BLT Mitigas Risiko Pangan dengan anggaran yang cukup besar.

Parlementaria mendapat komentar kritis dari dua anggota Komisi VIII DPR RI, I Komang Heri dan Hidayat Nur Wahid beberapa waktu lalu. Heri, misalnya, mempertanyakan ketidakhadiran Mensos pada setiap pembagian bansos di masa kampanye pemilu. Sebaliknya, para menteri yang tidak terkait dengan bansos malah hadir. Bansos dibagikan langsung oleh Presiden Jokowi.

“Sekecil apa pun uang negara harus dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini saya melihat Menteri Sosial tidak ikut dalam kegiatan tersebut. Karena itu, sebagai anggota Komisi VIII akan memanggil mitra kami, Menteri Sosial terkait hal tersebut,” ungkap Heri kepada wartawan.

Politisi asal daerah pemilihan Lampung ini mengaku, tidak memperlakukan program pemberian bansos tersebut. Namun, ia mempertanyakan sasaran penerima bansos, apakah tepat sasaran atau tidak. Pasalnya, data penerima bansos ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki Kementerian Sosial.

Heri berharap, pemberian bansos tidak dijadikan alat politik jelang Pemilu 2024. Sebagaimana diketahui bersama, salah satu calon wakil presiden dalam Pemilu 2024

“

Sekecil apa pun uang negara harus dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini saya melihat Menteri Sosial tidak ikut dalam kegiatan tersebut. Karena itu, sebagai anggota Komisi VIII akan memanggil mitra kami, Menteri Sosial terkait hal tersebut

I Komang Heri
Anggota Komisi VIII DPR RI



“

Seharusnya penerima Bansos tercakupi dalam DTKS. Nah, bagaimana itu bisa dipertanggung jawabkan sementara bansos diberikan begitu saja.

Hidayat Nur Wahid
Anggota Komisi VIII DPR RI

mendatang merupakan putra dari Presiden Jokowi. "Saya tegaskan kembali bahwa saya melihat pembagian bansos itu baik, kalau memang mereka yang mendapatkannya sudah terdata atau masuk di DTKS. Dan saya berharap hal itu tidak digunakan untuk kepentingan politik."

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi VIII DPR lainnya Hidayat Nur Wahid. Ia menilai, pembagian bansos yang merupakan domain Kemensos, seharusnya melibatkan Mensos, serta Komisi VIII DPR. Namun, justru Mensos dan Komisi VIII DPR tidak dilibatkan dalam distribusi bansos.

"Ini tentu menjadi bagian yang akan kami kritisi. Sayangnya, hari Senin kemarin sejatinya ada raker (rapat kerja) Kemensos dengan Komisi VIII DPR yang akan kami gunakan untuk mengkritisi dan mengevaluasi serta mengembalikan bansos ke fungsi awalnya. Bukan sebagai alat politik," ungkap Hidayat.

Dijelaskan politisi dari Fraksi PKS ini, pemberian bansos harus dipertanggungjawabkan dengan

merujuk pada DTKS yang ada. Bahkan, pihaknya menerima laporan bahwa pemerintah desa sudah membuat update DTKS tersebut.

"Seharusnya penerima Bansos tercakupi dalam DTKS. Nah, bagaimana itu bisa dipertanggungjawabkan sementara bansos diberikan begitu saja. Apalagi, saya mendapat laporan diberikan dengan disertai intimidasi. Sehingga, hal ini membuktikan pembagian bansos itu tidak

“

..... laporan dari masyarakat penerima bansos yang diintimidasi untuk memilih calon tertentu.

Hidayat Nur Wahid
Anggota Komisi VIII DPR RI

mempertimbangkan DTKS itu," ungkap Hidayat.

Bahkan, pihaknya juga menerima sejumlah laporan dari masyarakat penerima bansos yang diintimidasi untuk memilih calon tertentu. Apabila, si penerima bansos tidak memilih calon yang dimaksud, maka hak sebagai penerima bansos akan dicabut. Ini tentu bertentangan dengan prinsip utama pemberian bansos. Bansos diberikan untuk membuktikan kehadiran negara dalam melindungi seluruh rakyat Indonesia.

Yang terjadi selama masa kampanye pemilu justru sebaliknya, menyandera warga penerima bansos. Dana bansos bukan berasal dari dana milik pejabat atau kelompok politik tertentu, melainkan milik negara melalui APBN untuk seluruh rakyat atau warga negara yang memang berhak menerimanya.

"Saya sangat menyesalkan, mengapa bansos yang seharusnya menjadi bantuan sosial, kini malah menjadi bantuan yang justru menghadirkan masalah sosial baru, karena adanya data yang tidak akurat, diskriminasi, dan disertai dengan pengancaman," sesalnya.  ayu/mh

Intimidasi Di Balik Bansos

Pemilu 2024 diwarnai kepentingan masif penguasa. Salah satunya, memanfaatkan batuan sosial (bansos) untuk kemenangan politik. Anggaran bansos tahun ini juga melesat jauh daripada tahun-tahun sebelumnya.



FOTO: DOK/IR

Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya.



SEMBARI kampanye politik, paket bantuan sosial pun ditebar. Bahkan, dari beberapa pengaduan masyarakat ada intimidasi di balik

bagi-bagi sembako. Bansos makin jauh dari visi mengentaskan kemiskinan.

Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya yang dimintai komentarnya beberapa waktu lalu menyebutkan, banyak informasi aduan masyarakat yang ia terima, terutama dari keluarga

penerima manfaat (KPM) pada program keluarga harapan (PKH). Ada kelompok masyarakat yang diduga menerima intimidasi dari sejumlah pihak. Ancamannya berupa pencabutan bansos.

Komisi VIII DPR yang bermitra dengan Kementerian Sosial tetap berkomitmen melindungi para KPM dari berbagai ancaman dan intimidasi. Wisnu melanjutkan, aduan serupa juga datang dari KPM bansos lain seperti bantuan pangan non tunai (BPNT) dan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JK).

“

PKH adalah program nasional yang ditetapkan oleh pusat yang sumber pendanaannya berasal dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten dan kota...

Wisnu Wijaya
Anggota Komisi VIII DPR RI

Wisnu menegaskan, kewenangan pencabutan bansos PKH ada pada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial RI. Untuk itu, dia meminta agar para KPM PKH tidak perlu khawatir bila mendapat ancaman yang dilontarkan pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Mengacu pada Pasal 35 dan 36 Peraturan Menteri Sosial RI (Permensos RI) No.1/2018 tentang PKH, Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos), Kementerian Sosial RI adalah yang menetapkan sasaran, validasi, dan melakukan terminasi atau pemutusan bansos PKH. Jadi, kewenangan untuk mencabut bansos PKH mutlak oleh pusat, bukan oleh yang lain," tegasnya.

Anggota F-PKS DPR RI ini menerangkan, PKH adalah program nasional yang ditetapkan oleh pusat yang sumber pendanaannya berasal dari APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten dan kota, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Hal tersebut membuat pemerintah daerah juga memiliki peran dan kewenangan atas penyelenggaraan PKH meskipun sifatnya terbatas.

"Walaupun tidak memiliki kewenangan untuk menghapus KPM, pemerintah daerah punya kewenangan untuk mengusulkan kandidat penerima PKH kepada Kemensos RI melalui usulan berjenjang dengan memperhatikan hirarki kekuasaan. Selanjutnya, dari usulan tersebut akan ada validasi dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos RI dengan menerjunkan pendamping PKH ke lapangan guna memeriksa apakah nama yang diusulkan layak atau tidak layak," terang putra daerah Semarang ini.

Sekali lagi, ia menegaskan, penetapan layak atau tidaknya kandidat ada di tangan pemerintah pusat. Legislatur dapil Jateng I itu menambahkan, anggaran riil bansos PKH yang diterima langsung oleh

KPM berasal dari dana APBN setelah mendapat persetujuan dari Komisi VIII DPR.

Sementara, dana yang diambil dari APBD provinsi dan kota/kabupaten adalah anggaran penyertaan kegiatan PKH sebagai dukungan pelaksanaan PKH, misalnya untuk fasilitasi sosialisasi, pemantauan, dan bantuan percepatan pemberdayaan KPM PKH.

"Selain tergambar dari sumber pendanaan, besarnya pengaruh pusat atas PKH ini juga tergambar dari kewenangan yang dimiliki di antaranya penetapan kandidat penerima PKH, penghapusan KPM PKH, penetapan nilai bansos, besar manfaat, jumlah

demis melindungi hak-hak dasar warga negara," tegasnya.

Dijelaskannya, proses pencabutan bansos dilakukan berdasarkan aturan yang ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, bukan berdasarkan like or dislike penguasa apalagi beda pilihan politik.

Karenanya, ia meminta seluruh Anggota DPR RI sebagai representatif rakyat untuk terus melindungi hak-hak penerima bansos dan memastikan mereka terbebas dari ancaman dan gangguan. "Saya juga mendorong aparat penegak hukum agar responsif dalam merespon fenomena ini dan



Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya.

penerima, serta lokasi penyaluran bansos," urai Wisnu lagi.

Karena itu, Wisnu meminta semua pihak tidak melakukan intimidasi atau tekanan kepada rakyat penerima manfaat bansos menjelang Pemilu 2024. Pasalnya, belakangan sering ia dengar keluhan dari penerima bansos di dapil Jawa Tengah 1 yang dilanda intimidasi karena beda pilihan politik.

"Penerima bansos bukanlah objek politik yang dapat dieksploitasi atau ditakut-takuti, karena perbedaan pilihan politik. Fenomena ini adalah tantangan nyata yang harus diatasi

mengambil langkah terukur demi terciptanya suasana yang nyaman dan kondusif," jelasnya.

Menurutnya, bansos adalah bantuan yang bersumber dari APBN dan harus disalurkan secara adil kepada yang membutuhkan. Negara tidak boleh menggunakan bansos sebagai alat dagang atau untuk kepentingan pribadi. Sebagai representasi dari mandat konstitusi, bansos merupakan upaya negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.  rdn/mh

Antara Kebutuhan Rakyat dan Penguasa

Pemilu 2024 telah usai. Sambil menunggu proses penghitungan suara dan pengumuman resmi KPU, penting untuk merefleksikan kembali proses perjalanan Pemilu 2024 yang diduga kuat diintervensi persoalan non-teknis di luar pemilu.



Anggota Komisi VI DPR RI Luluk Nur Hamidah.

FOTO: DEP/NIK



POLITISASI bantuan sosial (bansos) dinilai bukan untuk kebutuhan yang menerima (masyarakat), melainkan untuk kebutuhan

yang memberi (penguasa). Tercatat, Presiden Jokowi sejak memimpin di tahun 2014 hingga 2024, tiap tahunnya menganggarkan ratusan triliun dari APBN untuk kebutuhan bansos.

Sejak, mantan Wali Kota Solo itu menjadi presiden, anggaran bansos selalu naik. Secara keseluruhan, selama sepuluh tahun dirinya memimpin, tercatat anggaran negara sebesar Rp4.158 triliun sudah habis untuk alokasi bansos. Nahasnya, hasil riset Institute for Development and Economics (INDEF) sampaikan bahwa ribuan triliun untuk bansos tersebut hanya berkorelasi dua persen terhadap

penurunan kemiskinan selama 10 tahun.

Dengan kata lain, bansos hanya mampu meredam kebutuhan singkat masyarakat untuk bisa makan, namun tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan struktural menahun akar kemiskinan di Indonesia. "Jadi, soal bansos itu harus ditujukan kepada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan, bukan untuk

kebutuhan si pemberi bansos," ujar Anggota Komisi VI Luluk Nur Hamidah kepada Parlementaria beberapa waktu lalu.

Senada dengan Luluk, Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmat Gobel, mengungkapkan segala jenis bansos bukan solusi untuk memberantas kemiskinan. Pemerintah yang menyalurkan bantuan itu sebaiknya memikirkan solusi terbaik lainnya, seperti menciptakan lapangan kerja.

"Pemberian bansos, sembako dan BLT itu sebenarnya bukan solusi memberantas kemiskinan. Itu bersifat jangka pendek, darurat dan sementara. Solusi terbaik adalah dengan menciptakan lapangan kerja agar pengangguran berkurang dan membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya," ujar Gobel.

Sayangnya, kerap kali setelah terbukti gagal untuk menghapus

“

tercatat anggaran negara sebesar Rp4.158 triliun sudah habis untuk alokasi bansos

Luluk Nur Hamidah
Anggota Komisi VI DPR RI



FOTO: AZKA/NR

“

Pemberian bansos, sembako dan BLT itu sebenarnya bukan solusi memberantas kemiskinan. Itu bersifat jangka pendek, darurat dan sementara.

Rachmat Gobel
Wakil Ketua DPR RI

kemiskinan, bansos kian diperparah menjadi alat politik penguasa. Pemerintah selalu berdalih bahwa bansos kerap dipandang sebagai jaring pengaman sosial, khususnya saat terjadi bencana alam, yang situasinya dinilai tidak dapat diprediksi.

“Yang ada adalah bansos milik negara, bukan milik presiden. Kalau masih gunakan APBN, uang rakyat, harus clear dan tidak diklaim untuk digunakan tujuan politik jangka pendek. Tidak etis,” ujar Gobel. Salah satu alasan terkini digulirkannya bansos di tahun 2024 karena terjadi bencana el-nino.

Melalui program BLT el-nino, pemerintah beralasan bahwa bansos diberikan dalam upaya menangani musim kemarau berkepanjangan dan kenaikan harga bahan pokok. Sehingga, tujuannya meningkatkan daya beli masyarakat kepada 18,8 juta Keluarga

Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai Rp400.000 per bulan per KPM.

Selain BLT el-nino, pemerintah juga memberikan bansos beras dengan besaran 10 kilogram. Uniknya, penyaluran bansos beras ini terjadi saat Indonesia berada di tahun politik, yaitu di sepanjang April 2023 hingga Maret 2024. Di luar dua bansos tersebut, pemerintah juga memberikan bantuan lain di tahun 2024, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) untuk ibu hamil dan balita, anak SD, anak SMP, anak SMA, lansia, dan penyandang disabilitas dengan besaran rupiah yang berbeda-beda.

Ada lagi bantuan pangan non-tunai yang ditujukan kepada keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25 persen terendah di daerah pelaksanaan, serta Program Indonesia Pintar (lihat infografis).

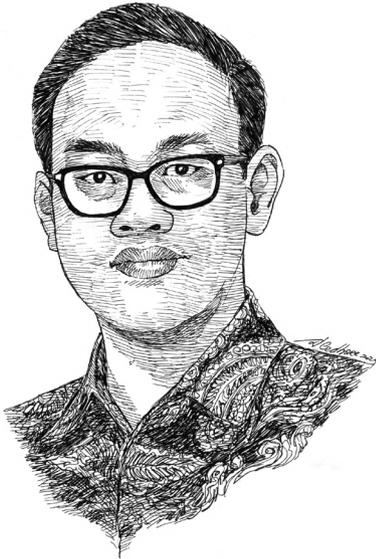
Alat Intimidasi

Meskipun demikian, penyaluran bansos tersebut bukan tanpa tekanan politis dari banyak pihak. Dari beberapa aduan yang disampaikan kepada Anggota DPR, banyak dari para KPM yang diintimidasi karena motif politik. Terutama, terkait dengan momentum Pemilu 2024. Bansos tersebut seolah-olah dijadikan klaim satu orang yang bertujuan untuk kepentingan jangka pendek.

“Bansos itu jangan sampai dipolitisasi apalagi kemudian alat intimidasi. Itu tidak dibenarkan. Jangan kapitalisasi dan mengambil manfaat dari orang susah. Itu penting sekali yang kita ingatkan,” tandas politisi Fraksi PKB itu.

rdn/mh

Perluakah Memperbesar Bansos pada 2025?

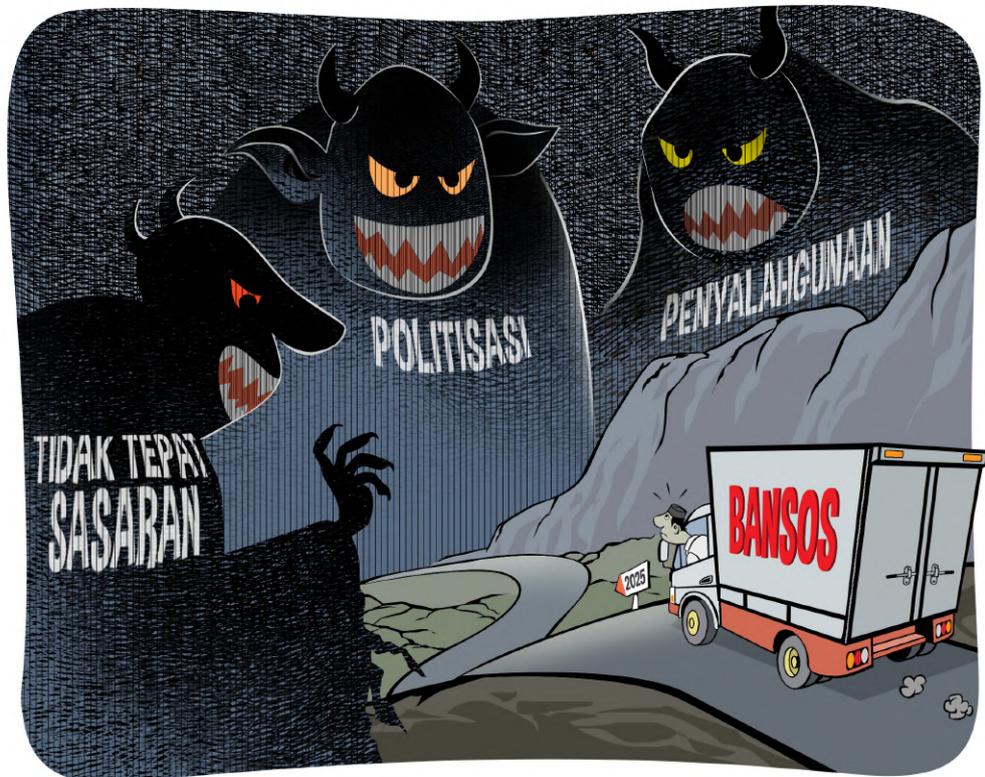


Oleh:
Bhima Yudhistira Adhinegara
Ekonom CELIOS

Fakta bahwa anggaran perlindungan sosial di Indonesia masih kecil tidak bisa dibantah. Pada tahun 2022 anggaran perlinsos cuma 1,5% dari PDB. Penduduk Indonesia yang masuk kategori rentan tercatat 52,8% dari total penduduk. Argumentasi kenaikan anggaran perlinsos juga didukung oleh sulitnya angka kemiskinan ekstrem mencapai 0% di 2024. Saat ini angka kemiskinan ekstrem 1,12% atau 6 juta orang.

Masalahnya data penerima bansos seringkali kurang tepat sasaran. Situasi ini bisa ditelusuri dari disparitas data kemiskinan secara faktual dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Orang yang tadinya masuk pengeluaran kelompok menengah

Bantuan sosial adalah program yang paling memicu polemik di tahun politik. Ada yang mengkaitkan dengan strategi paling efektif meraup suara. Tidak sedikit yang setuju pentingnya bansos untuk turunkan angka kemiskinan. Perdebatan soal bansos tidak hanya berhenti di tahun pemilu. Dengan alokasi bansos mencapai Rp496 triliun, timbul pertanyaan, perlukah angka yang jumbo dilanjutkan tahun depan? Apa ada alternatif selain bansos yang perlu dicoba?



pada saat survei, ternyata pada saat penyaluran bansos masuk menjadi orang miskin baru.

Selain data, soal politisasi bansos bukan hal yang baru. Siklus tiap 5

tahun juga sama, ada tren kenaikan bansos jelang pemilu di 2019 dan 2024. Bahkan, angkanya naik 1-2 tahun sebelumnya. Bedanya bansos kali ini tidak sekadar BLT tapi juga

bantuan beras 10kg. Varian bansos juga makin banyak. Bentuk politisasi bansos bisa beragam. Pertama, modusnya bisa segelintir pejabat yang turun ke lapangan dan sering terlibat acara seremonial pembagian bansos. Padahal, tupoksi dari pejabat tadi bukan bagian dari penyalur bansos.

Kedua, kementerian terkait bansos di-bypass atau kurang dilibatkan. Ketiga, paket bansos diberi tanda khusus, stiker atau cap untuk menegaskan kepada penerima bahwa bansos merupakan titipan salah satu kandidat. Yang berisiko tinggi dari politisasi bansos adalah penyimpangan penyaluran bansos ke konstituen yang sebelumnya tidak tercatat di data penerima. Menangkal politisasi bansos perlu dilakukan.

Pada tahun 2025 mendatang yang jelas tantangan ekonomi makin kompleks. Harga beras, gula, jagung, bawang putih diperkirakan bertahan di level tinggi. Alasannya komponen impor di beberapa komoditas pangan tadi cukup tinggi. Saat ini saja mencari beras impor murah dari Vietnam dan Thailand juga tidak mudah. Jurus

“

Pada tahun 2025 mendatang yang jelas tantangan ekonomi makin kompleks. Harga beras, gula, jagung, bawang putih diperkirakan bertahan di level tinggi.

impor beras jutaan ton nampaknya tak berdampak banyak terhadap stabilitas harga pangan.

Selain pangan, ada kecenderungan berbagai harga energi baik BBM, listrik, dan LPG akan mengalami penyesuaian. Ini sejalan dengan beragam kebijakan populis presiden baru yang akan menghabiskan anggaran relatif besar. Belajar dari Jokowi di 2015, anggaran paling empuk untuk dilakukan realokasi adalah anggaran subsidi energi.

Tapi, imbas dari pemangkasan subsidi energi entah dengan dasar pembatasan penyaluran BBM agar tepat sasaran, harga minyak mentah, fluktuasi kurs bisa dipakai jadi alasan naikan harga energi. Kalau harga energi naik terlalu tinggi, maka tanpa shock absorber dari sisi perlindungan sosial dikhawatirkan lonjakan kemiskinan terjadi dalam waktu singkat.

Tapi bansos sekadar temporer, tidak akan menyelesaikan masalah kemiskinan secara tuntas. Kelompok miskin ekstrem perlu dibantu dari sisi fokus infrastruktur untuk hunian layak, sanitasi, jalan-jalan desa, hingga listrik yang stabil. Akses pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas sama pentingnya. Sementara kelompok miskin dan rentan miskin butuh pekerjaan dengan upah yang layak.

Kenaikan formulasi upah minimum mendesak agar pekerja bisa terlindungi dari inflasi dan mendapat manfaat pertumbuhan ekonomi. Upah minimum memang pada faktanya diterapkan

pada sektor pekerjaan formal, sedangkan penduduk miskin sebagian besar bekerja di sektor informal. Memang tidak salah bekerja di UMKM, namun 97% komposisi UMKM didominasi sektor usaha mikro dan ultra mikro. Tugas pemerintah adalah memperkecil porsi sektor informal dan memperbesar kesempatan kerja di sektor formal.

Alternatif lain selain bansos konvensional perlu diuji coba. Sebagai contoh ide Universal Basic Income (UBI) atau pendapatan yang diterima warga negara yang mulai diuji coba oleh Finlandia dan Jerman menerobos teritori baru. Rutger Bregman, sejahrawan justru menemukan bahwa gelandangan di Eropa yang diberi bantuan basic income cenderung menggunakan uang untuk hal yang positif. Gelandangan yang dijadikan uji coba, menggunakan UBI untuk mendaftar pelatihan kerja. Jadi tidak selalu dana bansos seperti stereotip akan habis digunakan untuk keperluan konsumtif semata seperti membeli rokok.

Tahun 2025, bansos tetap dibutuhkan, namun efek jor-joran bansos pada dua tahun sebelumnya perlu diperhatikan. Efek ketergantungan pada bansos membuat masyarakat lebih rentan ketika bansos mengalami penyesuaian anggaran. Pemerintah harus menjawab program apa yang tepat agar perlindungan sosial tidak berhenti pada bansos yang rentan dipolitisasi setiap 5 tahun sekali. 🐾

“

Data penerima bansos seringkali kurang tepat sasaran. Situasi ini bisa ditelusuri dari disparitas data kemiskinan secara faktual dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Pajak Hiburan Ditinjau Ulang

Berupaya menyederhanakan sistem perpajakan di Indonesia, UU No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) melahirkan sejumlah isu. Satu di antaranya naiknya tarif pajak hiburan secara signifikan hingga 75 persen. Pengusaha berteriak, DPR menantikan judicial review.



FOTO: JAKA/NR

Anggota Komisi XI DPR RI Hafisz Tohir.

“

kenaikan PBJT berpotensi membebani pengusaha. Sebab itu, rencananya, Komisi XI akan mengundang Direktorat Jenderal Pajak untuk menyampaikan asumsi pengenaan pajak hiburan tersebut

Hafisz Tohir
Anggota Komisi XI DPR RI

DILANSIR dari Kementerian Keuangan, tujuan dari UU tersebut adalah mewujudkan pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia. Landasannya empat pilar utama, yakni penguatan *local taxing power*, ketimpangan vertikal dan horizontal yang menurun, peningkatan kualitas belanja di daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Harapan tidak selalu menjadi nyata. Tidak lama usai berlaku, menyesuaikan UU HKPD, sejumlah pemerintah daerah mengumumkan kenaikan tarif pajak dan jasa tertentu (PBJT) untuk kategori hiburan tahun 2024 sebesar 40-75 persen. Naik signifikan dari sebelumnya sebesar 25 persen,

pengusaha sektor hiburan termasuk Hotman Paris dan Inul Daratista menyuarakan penolakan.

Memperoleh sorotan tajam publik, Anggota Komisi XI DPR RI Hafisz Tohir menilai, kenaikan PBJT berpotensi membebani pengusaha. Sebab itu, rencananya, Komisi XI akan mengundang Direktorat Jenderal Pajak untuk menyampaikan asumsi pengenaan pajak hiburan tersebut.

“Kami akan mengundang Direktorat Jenderal Pajak di Komisi XI untuk menyampaikan asumsi mereka, kenapa ini menjadi ribut yang tadinya tidak ada keributan ya. Sebetulnya (pengaturan pajak) itu domainnya pemerintah tetapi jika ini meresahkan masyarakat, maka DPR berhak



FOTO: DEP/NR

mempertanyakan kepada pemerintah," tegas politisi Fraksi PAN ini.

Senada, Anggota Komisi X DPR RI Nuroji mempertanyakan sinergi kerja antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Pasalnya, ia menilai kebijakan ini menciptakan kondisi yang dilematis bagi para pengusaha pariwisata bidang hiburan.

Jika terlalu kaku menerapkan aturan tanpa mempertimbangkan aspirasi pengusaha, politisi Fraksi Partai Gerindra itu khawatir roda ekonomi pariwisata di Indonesia semakin lesu. Ia mengingatkan nilai kebijaksanaan harus diprioritaskan dalam pengambilan keputusan.

"Mungkin salah satunya kurang sinergi antarlembagaan, yang mungkin terjadi antara Kementerian Pariwisata dan Kementerian Keuangan dalam mendongkrak ekonomi kreatif pariwisata. Negara berusaha menaikkan pemasukan lewat pajak namun tentu ini terlalu berat untuk pengusaha dengan (kenaikan) angka segitu," ungkap Nuroji.

Dirinya menegaskan agar lembaga-lembaga tersebut saling berkoordinasi memastikan kenaikan pajak tersebut, tidak memberatkan para pengusaha

“

Kami merasa, baiknya kenaikan ini ditunda dulu dan didudukkan dengan para stakeholder untuk mencari jalan keluar yang berimbang

Dede Yusuf
Anggota Komisi X DPR RI



FOTO: DEP/NR

hiburan. Jika tidak ada koordinasi, menurutnya, negara akan mematikan industri pariwisata beserta para pelaku yang terlibat.

Supaya polemik ini tidak terjadi berkepanjangan, Nuroji menyampaikan bahwa Komisi X DPR akan berusaha melakukan mediasi dengan pihak pemerintah agar kenaikan pajak hiburan tidak signifikan naik.

Tunggu *Judicial Review*

Merespon kebijakan PBJT terbaru, Asosiasi SPA Terapis (ASTI) mengajukan *judicial review* terhadap UU HKPD ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua ASTI Mohammad Asyadi menyampaikan gugatan tersebut bersama 22 penggugat lainnya yang berasal dari sejumlah asosiasi terkait.

Presiden Joko Widodo pun menggelar rapat terbatas kabinet di Istana Negara pada pertengahan Februari lalu untuk menanggapi kenaikan PBJT sektor hiburan. Melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, pemerintah memutuskan menunda dan mengevaluasi.

Setali tiga uang, Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf meminta pemerintah menunda rencana kenaikan PBJT pada jasa hiburan yang menjadi 40-75 persen. Dirinya sepakat regulasi tersebut ditinjau ulang. "Kami merasa, baiknya kenaikan ini ditunda dulu dan didudukkan dengan para stakeholder untuk mencari jalan keluar yang berimbang. Tunggu hasil *judicial review* MK dan pemerintah harus duduk dengan para pelaku ekonomi tersebut, karena pajak jangan sampai memberatkan pelaku juga," ungkap Dede.

Sesuai dengan arahan, Dewan Pengurus Pusat Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (DPP GIPI) resmi menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada lima sektor pelaku usaha. Di antaranya pelaku usaha diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap atau spa.

Surat Edaran yang bernomor 091/DPP GIPI/II/02/2024 tertanggal 12 Februari 2024 menyatakan bahwa pembayaran pajak akan tetap sesuai tarif lama sambil menunggu proses hukum Pasal 58 ayat 2 UU HKPD selesai dibahas MK. — ts/mh

“

kebijakan ini menciptakan kondisi yang dilematis bagi para pengusaha pariwisata bidang hiburan. Jika terlalu kaku menerapkan aturan tanpa mempertimbangkan aspirasi pengusaha

Nuroji
Anggota Komisi X DPR RI

Anggaran Stunting yang Tepat Sasaran

Cita-cita negara dalam menyejahterakan masyarakatnya punya bentuk tanggung jawab di berbagai sektor. Salah satunya pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak-anak, demi penurunan angka stunting.



FOTO: KRESNO/NR
Ketua DPR RI Puan Maharani.

A PALAGI prevalensi terhadap kondisi kurangnya kondisi pertumbuhan generasi baru itu dari data yang terakhir mencapai 21,6% di Indonesia. Berkaca pada masalah itu, pemerintah diketahui menganggarkan program penurunan stunting tahun 2023 di seluruh kementerian/lembaga (K/L) dialokasikan sebesar Rp30 triliun.

Selain itu, pemerintah pusat juga memberikan anggaran penurunan stunting melalui alokasi dana transfer keuangan kepada pemerintah daerah sebesar Rp16,56 triliun. Anggaran ini terdiri dari insentif fiskal sebesar Rp1,68 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp5,91 triliun, dan DAK Nonfisik sebesar Rp8,97 triliun. Selanjutnya, dana desa juga diarahkan antara lain untuk program pencegahan dan penurunan stunting.

Menurut keterangan Kementerian Keuangan RI, terdapat 12 provinsi yang diprioritaskan dalam penanganan stunting di Indonesia, dimana

seluruh K/L bersinergi membantu penurunannya. Kemudian, jumlah provinsi prioritas penanganan stunting ditingkatkan menjadi 17 provinsi guna percepatan penurunan stunting di Indonesia.

Total insentif fiskal (penghargaan uang) yang diberikan untuk daerah yang menurunkan stunting tercepat dan terbaik pada 2022 adalah Rp1,68 triliun, yang diberikan kepada 90 daerah yang terdiri dari 20 provinsi, 30 kota, dan 40 kabupaten. Sedangkan realisasi untuk 2023 kemarin saja, insentif fiskal diberikan penurunan stunting diberikan kepada 125 daerah, yaitu 7 provinsi, 21 kota, dan 97 kabupaten.

Banyak Dinas

Sebelumnya Ketua DPR RI Puan Maharani sempat menyinggung anggaran stunting yang tak tepat

sasaran. Menurut penuturannya, terdapat daerah yang punya dana stunting dari APBD sebesar Rp10 miliar, namun yang digunakan konkret untuk membeli makanan bergizi bagi anak-anak stunting tak sampai Rp2 miliar. Sisanya lebih banyak digunakan untuk rapat-rapat dan perjalanan dinas.

"Sebagaimana yang pernah menjadi atensi Bapak Presiden ketika menemukan permasalahan pada pelaksanaan anggaran program stunting, di mana dari Rp10 miliar hanya Rp2 miliar yang dibelanjakan untuk kepentingan langsung kelompok penerima manfaat. Sedangkan Rp8 miliar dipergunakan untuk perjalanan dinas, rapat-rapat, penguatan dan pengembangan," paparnya.

Berkaca dari hal tersebut, DPR berharap agar belanja negara ke

depan harus semakin berkualitas. Puan mengatakan, hal ini penting demi memastikan alokasi anggaran betul-betul dirasakan masyarakat.

Menurut pantauan Komisi IX DPR RI realisasi anggaran percepatan penurunan stunting memang belum optimal. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurnasih Mufidayati mengakui dari temuan pihaknya dan hasil rapat kerja, ditemukan bahwa porsi anggaran masih digunakan untuk kegiatan kedinasan yang tidak terlalu menyangkut isu stunting.

"Hal ini perlu dievaluasi secara menyeluruh, supaya secara maksimal dapat diterapkan. Apalagi target pemerintah tahun 2024 angka stunting bisa turun menjadi 14%," terang politisi Fraksi PKS ini. Ia mendesak pemerintah dapat mengukur pagu indikatif dan program-program yang sudah berjalan.

"Momen pagu indikatif ini harus dijadikan untuk mengukur sejauh mana serapan dan keberhasilan penurunannya (stunting). Ini harus diukur dan bisa enggak terkejar? Lalu anggaran ini ke mana saja," urai Kurniasih. Pada akhirnya Kurniasih mendorong pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan terkait saling berkolaborasi atasi stunting. Sebab penurunan stunting perlu dilakukan demi terwujudnya cita-cita Indonesia Emas 2045.



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurnasih Mufidayati.

Pemda Perhatikan

Dalam kesempatan berbeda, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyayangkan pengaplikasian program ke daerah tak berjalan maksimal. Menurutnya pemerintah daerah (pemda) kurang fokus mengimplementasikan program penurunan stunting ini. Untuk itu, ia mendorong penganggaran dapat dialokasikan pada pemenuhan asupan nutrisi ibu hamil dan bayi secara langsung.

"Anggaran kita terbatas, kita ingin apa yang dilakukan langsung spesifik untuk penanganan stunting. Perlu protein hewani dan nutrisi yang seimbang bagi ibu hamil dan bayi. Kalau ada anggaran dipakai non itu

tidak efisien, ujung-ujungnya rakyat yang berhak memperoleh dapatnya sedikit," ungkap legislator Dapil Jawa Tengah III ini.

Soal anggaran yang terbatas memang menjadi perhatian, sebab tahun 2022 saja anggaran penurunan stunting mencapai Rp44,8 triliun. Dengan anggaran yang lebih kecil di tahun 2023, menurut Edy, pemerintah harus cermat mengalokasikannya dengan baik. Pelaksanaannya sampai ke bawah harus diawasi. "Pemda akan dievaluasi, pemberian makanan bergizi secara langsung dapat jadi solusi," katanya.

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kesempatan menjabarkan, tahun 2022 angka stunting 21,6%, turun tajam dari tahun 2018 yang sebesar 30,8%. "Presiden Jokowi menargetkan penurunan stunting tahun 2024 menjadi 14%. Ini perlu kerja sama dan sinergi berbagai pihak untuk menyelamatkan anak-anak balita Indonesia dari stunting," terang Menkeu.

Adapun data terakhir hingga 30 September 2023, realisasi anggaran ini adalah sebesar Rp22,5 triliun atau 74,9 persen. "Anggaran penurunan stunting APBD berada di kisaran Rp19,92 triliun dengan realisasi sebesar Rp4,63 triliun," lanjut Sri Mulyani. **aha/mh**



RUU Desa Mengkompromikan Masa Jabatan Kepala Desa

Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diwarnai tuntutan dari para kepala desa dan perangkat desa. Sejak mulai dibahas pada pertengahan 2003 lalu, RUU ini memiliki tiga isu krusial yang menjadi pokok pembahasan.

Pertama, kesejahteraan kepala desa dan aparat desa. Kedua, perubahan komposisi masa jabatan kepala desa. Dan ketiga, besaran dana desa. Perjuangan aspirasi pemerintah desa tersebut diakomodir DPR dengan disahkannya RUU Desa menjadi RUU usul inisiatif DPR RI pada Rapat Paripurna Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023.

Terus menerima aspirasi dari Pemerintah Desa yang menginginkan segera disahkannya RUU ini, Badan Legislasi (Baleg) DPR kembali membahas RUU tersebut dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) awal Februari lalu. Salah satu poin krusial yang disepakati dalam Pengambilan Keputusan Tingkat I Rapat Panitia Kerja (Panja) Baleg DPR RI bersama Mendagri, yakni masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk dua kali masa jabatan.

Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun dan dapat dipilih paling banyak dua kali masa jabatan. "Kami menangkap aspirasi dari asosiasi kepala desa dan perangkat desa yang menginginkan UU Desa

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desa bekal-kali didemo APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia). Ada aturan masa jabatan kepala desa yang terus ingin dikompromikan.



FOTO: DEP/RI
Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi.

direvisi dan sudah kita tangkap menjadi usulan inisiatif DPR. Kemarin janji kita pada masa sidang ini akan disahkan setidaknya pada pengambilan tingkat I di Baleg sesuai penugasan dari pimpinan," ungkap Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi kepada Parlemenaria.

Setelah melalui pembahasan mendalam, dinamis, dan demokratis, Panja RUU Desa secara mufakat memutuskan antara lain hal-hal sebagai berikut. Pertama, penyisipan Pasal 5A tentang pemberian dana

“

Kami menangkap aspirasi dari asosiasi kepala desa dan perangkat desa yang menginginkan UU Desa direvisi

Achmad Baidowi
Wakil Ketua Baleg DPR RI



FOTO: KRESNO/NR

Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menerima aspirasi dari Apdesi di Gedung DPR RI.

konservasi dan/atau dana rehabilitasi, ketentuan Pasal 26, Pasal 50A, dan Pasal 62 ditambah pengaturan terkait pemberian tunjangan purna tugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan kepala desa, BPD, dan perangkat desa sesuai kemampuan keuangan desa.

Kedua, penyisipan Pasal 34A terkait syarat jumlah calon kepala desa dalam Pilkades. Ketentuan Pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun dan dapat dipilih paling banyak dua kali masa jabatan. Lalu ada Pasal 72 terkait sumber pendapatan desa; Ketentuan Pasal 118 terkait ketentuan peralihan, dan Pasal 121A

terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang.

Hasil Panja kemudian secara resmi disepakati sembilan fraksi pada pembahasan tingkat I. Baidowi mengungkapkan, langkah selanjutnya adalah penyerahan hasil pembahasan tingkat I ke Paripurna untuk disahkan. Usai disepakati dalam Pembahasan Tingkat I, Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima perwakilan 21 organisasi perangkat desa yang menyampaikan aspirasinya terkait revisi UU Desa.

Baik DPR dan perwakilan perangkat

desa sepakat menghormati proses pembahasan RUU Desa yang saat ini dalam tahap pengambilan keputusan tingkat I. "DPR melalui Baleg dengan pemerintah sudah menyepakati satu kesepakatan substansi yang nantinya akan dibahas kembali sesuai mekanismenya. Mereka sudah memahami mekanisme tersebut untuk bisa sama-sama dilakukan, kemudian akan sama-sama menghargai dan menghormati," ujar Puan.

Puan berharap dengan sama-sama menghormati proses perundang-undangan yang ada, RUU Desa dapat bermanfaat bagi pemerintah desa maupun masyarakat. DPR pun berkomitmen terus menerima aspirasi dari masyarakat dalam proses pembahasan revisi undang-undang usul inisiatif DPR tersebut.

"Tidak akan ada lagi menyampaikan aspirasi secara tidak tertib, namun aspirasi mereka nanti tentu saja akan kami terima dalam pembahasan-pembahasan untuk menerima aspirasi-aspirasi sebelum kemudian revisi Undang-Undang Desa itu diputuskan dalam waktu yang akan datang," jelasnya kepada awak media. **bia/mh**



FOTO: KRESNO/NR

Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menerima aspirasi dari Apdesi di Gedung DPR RI.



Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menerima aspirasi dari Apdesi di Gedung DPR RI, Selasa, (06/02/2024). FOTO: KRESNO/MAN



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal dan Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi, saat menerima audiensi masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) atau Kerukunan Warga Puncak (KWP) di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/2/2024). FOTO: GERALDI/MAN





Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhan saat menyampaikan keterangan DPR dalam agenda sidang tentang Pengujian Materil UU KPK dan KUHP di Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2024). FOTO : ARIEF/MAN



Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon dan Anggota DPR RI Ledia Hanifa Amaliah foto bersama usai diskusi Program Pemilunesia bertajuk "Pemilu Legislatif, Bijak Memilih Pasti Terwakili," yang diselenggarakan oleh Biro Pemberitaan Parlemen bersama TEMPO Media Group di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/2/2024). FOTO : FARHAN/MAN



Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi dalam sesi foto bersama usai menjadi narasumber di acara Gathering Televisi dan Radio Parlemen dengan tema "Memperkuat Kohesivitas Tim Kerja TVR Parlemen Sebagai Media Referensi Indonesia" di Yogyakarta, Jumat (16/2/2024). Foto : Prima/Man



Deputi Administrasi Setjen DPR RI Sumariyandono saat menerima penghargaan KPPN Award 2023 di Aula Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, Jatinegara, Jakarta, Rabu (21/2/2024). FOTO : ENO/MAN





Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar saat melantik sepuluh pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/2/2024). FOTO : HANS/MAN



Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar foto bersama usai membuka pelatihan penulisan berita yang diselenggarakan Bagian Media Cetak & Media Sosial, Biro Pemberitaan Parlemen di Ruang Pansus B, Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (31/1/2024). FOTO : FARHAN/MAN





Badai Partisipasi Menyambar Momentum DEMOKRASI

NARASI: DEVI IRIANDI | FOTO: TIM PARLEMENTARIA



Hari masih pagi, rintik gerimis pun masih kerap membasuh paras ibu kota yang lengang dan sepi. Hujan lebat semalam suntuik telah menyisakan cenderamata berupa genangan di beberapa tepi jalan yang disusuri.

Seolah tak peduli dan bukan menjadi sesuatu yang merintang, animo masyarakat begitu tinggi mendatangi tempat pemungutan suara di wilayahnya sendiri, demi partisipasi nyata dari penegakkan dan pelaksanaan proses demokrasi yang ada.

Tanggal 14 Februari 2024 merupakan momentum penting dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi menuju masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik. Oleh karenanya, banyak warga yang turut berpartisipasi

aktif dalam pelaksanaan pemilu serentak kali ini dan memastikan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan lancar, transparan, adil, aman, dan berkualitas.

D sisi lain, kita juga menyadari betapa kompleksnya tugas yang diemban oleh penyelenggara pemilu, baik dari sisi teknis maupun pemenuhan prinsip-prinsip demokrasi yang harus dijunjung tinggi. Hal ini menjadi konsekuensi logis dari persiapan dan kesiapan penyelenggaraan pemilu yang matang, profesional, dan berintegritas.

Tentu kita sebagai putra-putri pemilik negeri tercinta ini berharap penyelenggaraan pemilu serentak ini bisa menjadi momentum memperkuat implementasi demokrasi dan membangun kehidupan berbangsa yang lebih baik 🇮🇩





Supriansa
Sang Anak Petani

Supriansa, Pria kelahiran Soppeng, Sulawesi Selatan ini, masa kecilnya dihabiskan kampung halamannya, Leworeng, Kecamatan Donri, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Ia anak seorang petani bersahaja. Supriansa kecil sangat suka bermain di sawah bersama teman-temannya.

A lahir di Soppeng, Sulsel, 31 Desember 1972. Di kampung halamannya itu, Supriansa kecil menempuh pendidikan di SD 45 Toddang Saloe, Leworeng Soppeng hingga melanjutkan ke bangku SMP Muhammadiyah sekitar tahun 1988.

Biasanya sepulang dari sekolah, ia ke sawah sebagai tempat favoritnya untuk bermain. Sambil bermain, ia juga mengembala beberapa ekor sapi. Senangnya mengingat masa kecil di kampung. Waktu pun berlalu, Supriansa pun berhasil menamatkan pendidikan formalnya hingga SMA di Soppeng.

Aktivis Mahasiswa

Hijrah ke Makassar, Supriansa melanjutkan studi di Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Ia angkatan tahun 1993 di kampus tersebut. Ketika menjadi mahasiswa, Supriansa banyak bergelut di organisasi intra kampus maupun extra kampus. Intra kampus, Supriansa muda aktif di Senat Fakultas Hukum UMI. Bahkan, ia tercatat pernah menjadi Ketua Senat Fakultas Hukum UMI.

Sebagai aktivis kampus, Supriansa gencar menggelar aksi unjuk rasa di jalanan. Termasuk, terlibat langsung dalam aksi unjuk rasa menggulingkan rezim Orde Baru pada tahun 1998.



Selain itu, Supriansa juga sempat menjabat sebagai Sekjen ISMAHI Indonesia Timur.

Sementara di organisasi ekstra kampus, Supriansa juga tercatat sebagai kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Makassar. Selain aktif menggelar aksi unjuk rasa untuk isu nasional, demokrasi, dan politik, Supriansa gencar menggelar aksi untuk perlindungan masyarakat dan petani.

Setelah lulus kuliah, ia kemudian mendirikan Makassar *Intellectual Law* (MIL). LSM yang ia dirikan bersama kawan-kawannya dari UMI tersebut bergerak dalam bidang advokasi dan perlindungan hukum bagi masyarakat kecil, pedagang kaki lima, petani, hingga masyarakat pedesaan.

Kala itu, masyarakat kecil, petani, dan pedagang kaki lima kesulitan mendapatkan perlindungan hukum dari pengacara, karena membutuhkan biaya mahal. Maka, MIL yang ia dirikan



Supriansa bersama keluarga tercinta



“

Kami berpesan bagaimana supaya pertama koordinasi antara seluruh penyelenggara pemilu ini terutama KPU Bawaslu ini harus dijaga dengan baik

Ahmad Doli Kurnia Tanjung,
Ketua Komisi II DPR RI



menjadi lembaga yang memberikan layanan hukum bagi masyarakat kecil.

MIL yang komandoi Supriansa hadir di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum dan advokasi tanpa memungut biaya sepeser pun. Pada saat yang sama, Supriansa juga diberi amanah menjabat sebagai Ketua Granat (Gerakan Nasional Anti Narkotika) di Sulsel. Dari Makassar, Sulsel, Supriansa lalu hijrah ke Jakarta dan berprofesi sebagai pengacara.

Memasuki tahun 2015, Supriansa kembali lagi ke Kabupaten Soppeng untuk mengikuti kontestasi politik sebagai kepala daerah. Pada Pilkada itu, ia terpilih menjadi Wakil Bupati Soppeng. Selama tiga tahun menjabat sebagai Wakil Bupati Soppeng, Supriansa disenangi warga Soppeng.

Tercatat, Supriansa rutin keluar masuk kampung dan masjid-masjid untuk menemui masyarakat Soppeng. Supriansa juga gencar mendisiplinkan para pegawai negeri sipil di lingkungannya. Saat menjabat Wakil Bupati Soppeng, Supriansa meminang gadis pujaan hatinya Andi Nurul Muliza.



Wakil Rakyat

Memasuki pemilu 2019, Supriansa ikut kontestasi politik lagi. Kali ini pada pemilihan legislatif untuk mendapatkan kursi di DPR RI. Setahun sebelumnya, 2018, ia sudah mengundurkan diri sebagai wakil bupati. Maju dalam pileg 2019, ia berada di dapil Sulsel II dari Partai Golkar.

Di hadapan ribuan warga Soppeng, Supriansa meletakkan segala lencana Wakil Bupati di bawah sinaran rembulan, dan isak tangis ribuan warga Soppeng. Supriansa harus mundur untuk maju mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Pada Pemilu 2019, ia terpilih menjadi wakil rakyat dan melenggang ke Senayan.

Pada 1 Oktober 2019, Supriansa dilantik sebagai anggota DPR RI. Selama di DPR, ia duduk di Komisi III DPR yang membidangi hukum. Sementara di partai sendiri, ia diberi tanggung jawab sebagai Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar. Jabatan lain di DPP Golkar adalah sebagai Hakim Majelis Partai Golkar. Begitulah kisah singkat perjalanan hidup Supriansa, sang anak petani yang kini menjadi wakil rakyat. — pun/mh



Memetakan Kerawanan Pemilu

Kerawanan menyangkut keamanan jelang dan selama pemilu terus dipetakan Komisi I DPR RI. Di daerah, Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) dan pemerintah daerah selalu diajak membincang peta kerawanan sosial Pemilu 2024.

Pada kunjungan ke Provinsi Banten, Rabu (7/2) silam. Delegasi Komisi I menggelar pertemuan dengan Kepala Binda Banten di Tangerang Selatan, Banten. Deteksi dini kerawanan konflik terpapar dengan jelas sekaligus bagaimana

menghadapinya. Peta kerawanan pemilu di Banten tergambar, baik lokasi maupun unsur yang berpotensi memunculkan konflik.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi I mendapat penjelasan lengkap soal peta kerawanan pemilu di Banten. "Kita dapat penjelasan dari Kabinda yang

cukup komprehensif dan secara detail bagaimana mengantisipasi dan mendeteksi dini persiapan pemilu, bahkan pasca pemilu juga. Di Banten ini insyaallah relatif cukup bagus," ujar Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini yang memimpin pertemuan tersebut.



FOTO: UCHA/AMAN

Anggota Komisi I DPR RI, Jazuli Juwaini saat melakukan kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Provinsi Banten pada Rabu (7/2/2024).

“

dibutuhkan kerja sama, koordinasi, dan komunikasi yang sinergis antara pihak-pihak demi terwujud dan terlaksananya pemilu damai, jurdil

Jazuli Juwaini
Anggota Komisi I DPR RI

Pada kesempatan yang sama, legislator Dapil Banten II ini mengingatkan bahwa pemilihan umum serentak yang diselenggarakan pada 14 Februari 2024 tak hanya melibatkan KPU dan Bawaslu. Lebih dari itu, Jazuli menuturkan bahwa ada banyak pihak lain yang juga berperan dalam pesta demokrasi ini seperti aparat TNI dan Polri, hingga Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Politisi Fraksi PKS ini lantas berharap ada sinergi dari kementerian dan lembaga terkait untuk mewujudkan pemilu yang damai serta menjunjung tinggi asas Luber-Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia - jujur dan adil).

"Banyak pihak lain yang terlibat baik itu polisi, TNI, dan lain-lain yang dibutuhkan kerja sama, koordinasi, dan komunikasi yang sinergis antara pihak-pihak demi terwujud dan terlaksananya pemilu damai, jurdil, sehingga lahir pemimpin yang betul-betul dikehendaki oleh mayoritas rakyat republik Indonesia, baik itu yang ada di eksekutif dan yang ada di legislatif," tutup politisi Fraksi PKS itu.

Menilik dari anggaran pemilu, setidaknya terdapat 14 kementerian/ lembaga di luar KPU dan Bawaslu yang ikut berperan dalam pengamanan, pengawasan, dan penyelenggaraan pemilu. Misalnya, Dewan Kehormatan



FOTO: BUNGA/NR

Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari dalam foto bersama usai memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR ke RRI Bandung, pada Rabu (7/2/2023).

Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga lembaga penyiaran TVRI dan RRI.

Sementara di Bandung, Jawa Barat, delegasi Komisi I DPR dipimpin Abdul Kharis Almasyhari, berkunjung ke RRI Bandung. Pertemuan masih membincang persiapan pemilu. RRI selalu diimbau mensosialisasikan pemilu kepada masyarakat luas. Strategi sosialisasi penting dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilu. Di Jawa Barat sendiri pemilih yang belum menentukan pilihannya (*undecided voters*) cukup signifikan jumlahnya.

"Berkaitan dengan fenomena undecided voters yang belum atau tidak menggunakan hak pilihnya, kita mendorong pada RRI untuk selalu mengimbau masyarakat menggunakan hak pilihnya dan terlibat secara aktif dengan mendatangi TPS pada 14 Februari 2024. Sehingga, keikutsertaan pemilu masyarakat bisa meningkat," ungkap Wakil Ketua Komisi I DPR ini, Rabu (7/2) lampau.

Dalam pertemuan tersebut, Kharis menyorot peran media massa seperti RRI dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Beliau menekankan agar media massa memiliki strategi dalam menginformasi dan mendidik masyarakat untuk aktif berpartisipasi politik pada pesta demokrasi tahun 2024 ini.

Legislator PKS tersebut tak lupa menekankan RRI Bandung memperkuat program-program pemilu, seperti diskusi publik dan penyiaran informasi seputar demokrasi dan hak-hak politik warga negara.

"Saat ini, kita perlu merangkul seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang masih merasa bimbang dalam menentukan pilihannya. Melalui media seperti RRI, kita dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya partisipasi dalam proses politik dan menawarkan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat dan tentunya tetap mempertahankan netralitas siaran," ujar Kharis.

uc, blf/mh

Komisi II DPR

Serukan Masyarakat Datangi TPS

Pendidikan politik terus digencar Komisi II DPR RI menyambut pesta demokrasi 2024 ini. Pada setiap kali kunjungan kerja, Komisi II DPR selalu menggelar pertemuan dengan KPU, Bawaslu, dan Pemda tentang pentingnya mendatangi TPS sebagai bukti partisipasi politik yang baik.

14 Februari 2024 adalah momen penting bagi bangsa ini untuk memilih para pemimpin bangsa di eksekutif dan legislatif. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengajak para pemilih datang berduyun-duyun ke tempat pemungutan suara (TPS) yang telah ditetapkan. Ia pun

meminta masyarakat memantau aktif pelaksanaan pemilu, karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

Seruan ini disampaikan di Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (7/2) silam. Walaupun diselenggarakan pada tanggal kejeput, tapi tidak melunturkan antusiasme pemilih untuk mencoblos. "Kehadiran bapak dan ibu di TPS menjadi penting, penentu masa depan kita. Jadi, jangan sampai kita tidak

datang karena hanya ingin libur saja. Ini menentukan nasib bangsa kita. Pastikan untuk datang, 14 Februari," seru Doli.

Memanfaatkan masa tenang Pemilu 2024, politisi Fraksi Golkar itu mengingatkan untuk mempelajari visi dan misi para calon presiden, para calon wakil presiden, dan para calon legislatif sebelum memutuskan mencoblos. Masa tenang pemilu



FOTO: SAJIM/NR

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung (kanan) saat mengikuti Kunjungan Kerja di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Rabu lalu (7/2/2024).



FOTO: BALGGYS/NR

Anggota Komisi II DPR RI Riyanta saat foto bersama usai memimpin rapat kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Surabaya (7/2/2024).

berlangsung mulai Minggu, 11 Februari 2024 sampai Selasa, 13 Februari 2024. "Jika partisipasi (pemilih) tinggi, harapannya Indonesia memiliki pemimpin yang berkualitas dan para wakil rakyat yang sesuai dengan pilihan hati nurani masyarakat," tandas legislator daerah pemilihan Sumatera Utara III itu.

Sebagai informasi, KPU menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 dengan jumlah total sekitar 204,8 juta pemilih. Angka tersebut terdiri dari pemilih di dalam dan luar negeri, yang tersebar di 514 kabupaten/kota, 38 provinsi, dan 128 negara perwakilan. Ada lima provinsi yang memiliki jumlah pemilih terbanyak, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten.

Secara rinci, jumlah pemilih laki-laki sebanyak 102.218.503 orang dan pemilih perempuan sebanyak 102.588.719 orang. Jumlah Tempat

Pemungutan Suara (TPS) yang ditetapkan KPU baik di dalam dan luar negeri sebanyak 823.220.

Sementara di Surabaya, Jawa Timur, Anggota Komisi II DPR Riyanta berharap kepada KPU dan Bawaslu memastikan kesuksesan Pemilu 2024. Ini adalah pemilu monumental, karena menyatukan pilpres, pileg, dan pilkada di tahun yang sama. Pilkada serentak direncanakan pada 27 November 2024.

"Penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu atas kerja keras dan persiapannya. Terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur atas kerja sama yang baik dalam mendukung kelancaran persiapan Pemilu 2024," ujar Riyanta usai memimpin rapat kunjungan kerja di Surabaya, Rabu (7/2) silama.

Dengan 31.402.838 warga Jawa Timur terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024,

yang melibatkan pemilih reguler dan lokasi khusus. Jumlah DPT mencakup 15.495.556 pemilih laki-laki dan 15.907.282 pemilih perempuan, tersebar di 38 Kabupaten/Kota, 666 kecamatan, 8.494 desa/kelurahan, dan 120.666 tempat pemungutan suara (TPS).

Dalam menghadapi kompleksitas pemilu serentak, rencana pengiriman logistik ke tempat-tempat terpencil melalui kapal juga telah ditinjau. Selain itu, kerja sama lintas stakeholder dan dukungan penuh, persiapan dan kesiapan pemilu serentak 2024 di Jawa Timur mencerminkan kompleksitas dan besarnya demokrasi Indonesia.

"Saya mengapresiasi jajaran pemerintah daerah provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten kota Jawa Timur yang begitu membantu, juga jajaran Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), dimana semua terlibat dalam menyukseskan Pemilu 2024," tutupnya.  ts, gys/mh

Komisi III

Apresiasi Polda Jambi



FOTO: SHANE/NR

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh saat memimpin pertemuan Kunker Reses Komisi III di Polda Jambi, Sabtu, (2/3/2024).

Polda Jambi telah membangun Gedung SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) yang humanis, jauh dari kesan menegangkan. Ini bisa jadi model bagi Polda lain untuk membangun yang sama.

Memang berbeda dengan kunjungan biasanya, kunker reses kali ini diawali tinjauan ke Gedung SPKT baru di Polda Jambi. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh mengapresiasi model gedung humanis tersebut. "Gedung SPKT ini mungkin satu-satunya gedung yang dekat kepada masyarakat. Seperti apa yang kita lihat, ini mungkin jadi role model untuk Polda-Polda lainnya," ungkap Pangeran pada konferensi pers

Komisi III di Polda Jambi, Sabtu, (2/3) lampau.

Anggota Komisi III Eva Yuliana juga mengapresiasi hal yang sama. Ruang-ruang dalam SPKT ini terasa berbeda dan nyaman. Tagline yang tertulis di dinding gedung itu, "Ngewongke uwong". Itu filosofi bagaimana menghargai masyarakat yang datang ke Polda. Kapolda Jambi Rusdi Hartono menjelaskan, bangunan ini didesain sedemikian rupa agar masyarakat yang datang dan mengadu ke kantor kepolisian bisa lebih nyaman dan rileks.

PT Sulut Butuh Anggaran

Sementara delegasi Komisi III DPR yang berkunjung ke Sulawesi Utara, menggelar pertemuan dengan para ketua Pengadilan Tinggi (PT) Sulut dan jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham.

PT Sulut sangat membutuhkan dukungan anggaran dari Komisi III DPR. Ini penting agar penyelenggaraan negara berjalan optimal di Sulut. Itulah yang disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Romo Muhammad Syafi'i di Manado, Sulut, Rabu (28/2) lalu. "Problemnya sama, yaitu masalah kekurangan anggaran, selain itu juga kekurangan personil atau SDM," kata Romo.

Legislator Fraksi Partai Gerindra itu mengatakan, meskipun kekurangan dua hal tersebut tetapi mereka masih bisa bekerja dan menjalankan tugas konstitusionalnya dengan baik. Soal anggaran, sebenarnya itu bukan karena pemerintah pusat tidak ingin memenuhi, tetapi karena ruang fiskalnya masih sempit," tambah Romo.

Legislator daerah pemilihan Sumatera Utara I itu menegaskan bahwa Komisi III DPR akan terus mendukung dan mendorong peningkatan anggaran di tingkat pusat melalui Badan Anggaran DPR RI.



Anggota Komisi III DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan tiga lembaga peradilan se-wilayah Provinsi Banten, di Tangerang, Banten, Senin (04/03/2024).

Pengadilan Agama

Kasus perceraian di Banten sangat tinggi. Salah satu pemicunya faktor ekonomi. Ini yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Selain itu, kemajuan teknologi juga memberikan andil terjadinya keretakan rumah tangga dan memicu hadirnya pihak ketiga. Masalah ini menjadi perhatian Anggota Komisi III DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa yang meminta hakim di pengadilan agama tidak mempermudah putusan perceraian.

"Tingginya kasus perceraian di Banten, disinyalir karena banyaknya pernikahan dini atau belum matang berumah tangga. Kemudian banyak pernikahan disebabkan hamil di luar nikah atau dipaksakan. Namun, kita meminta hakim selaku mediator selalu meminta kepada kedua belah pihak berdamai agar perceraian tidak terjadi," ujar Rosi di Tangerang, Banten, Senin (04/3) silam.

Rosi mengungkapkan di Pengadilan Agama Serang ada program isbat nikah setiap tahun yang didukung Pemkab Serang dan Pemkot Serang. Menurutnya, kalau ada pernikahan tidak sesuai undang-undang, misalnya nikah siri, kemudian disahkan pada isbat nikah, maka hak anak dan istri dalam pernikahan tersebut menjadi legal.

"Kami terus mendorong agar isbat nikah bisa terus berlangsung di setiap kabupaten/kota walaupun memang dalam setiap pelaksanaannya ada kendala. Misalnya anggaran, kurang ada komunikasi yang baik dengan Pemda masing-masing. Kalau ini berjalan dengan baik dan Komisi III DPR terus men-support anggaran pengadilan agama dan pengadilan tinggi Banten. Mudah-mudahan segala macam program berjalan baik," ungkap politisi Fraksi Partai Golkar ini.

syn, cas, man/mh



FOTO: CHASBI/NR

Anggota Komisi III DPR RI Romo Muhammad Syafi'i saat memimpin pertemuan Kunker Reses Komisi III DPR RI di Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (28/2/2024).

Kebun Binatang Surabaya Berhasil Kembangbiakan Komodo

Konservasi satwa yang dilakukan Kebun Binatang (KB) Surabaya, Jawa Timur mendapat apresiasi dari Komisi IV DPR RI. Salah satu satwa yang dikonservasi adalah komodo. Satwa endemik dari NTT ini berhasil dikembangbiakan. Setidaknya ada 29 ekor telur komodo yang berhasil ditetaskan melalui inkubator.



FOTO: GALUH/ANS

Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI, Djarot Saiful Hidayat, saat meninjau Kebun Binatang Surabaya (KBS), Jawa Timur.

Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. KB Surabaya mendapat predikat nilai B.

Perbaikan Lahan Rusak

Di Demak, Jawa Tengah, Komisi IV DPR melihat kerusakan lahan sawah akibat banjir. Perlu ada revitalisasi jaringan irigasi terhadap 3.427 hektar lahan sawah di Demak ini. Selain infrastruktur irigasinya sudah tua dimakan waktu, juga minim pemeliharaan.

Komisi IV DPR RI berkomitmen memperjuangkan perbaikan lahan yang rusak tersebut. Wakil Ketua Komisi IV DPR Budhy Setiawan yang memimpin kunjungan ini

KB Surabaya diproyeksikan menjadi percontohan terutama bagi konservasi satwa langka dan endemik Indonesia. Anggota Komisi IV DPR Djarot Saiful Hidayat saat memimpin delegasi Komisi IV ke KB Surabaya mengatakan, KB Surabaya bisa jadi percontohan dalam pengembangbiakan komodo, sehingga hasilnya bisa didistribusikan ke beberapa KB lain yang tidak memiliki koleksi satwa komodo.

"Ini menjadi percontohan supaya komodo kita itu betul-betul banyak

sekali di sini. Kemudian bisa ditukarkan dengan kebun binatang yang tidak mempunyai koleksi Komodo," jelas Djarot. Kamis (29/2) lalu. Ia sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan KB Surabaya ini. Selain sebagai wahana rekreasi, KB ini juga menjadi wahana edukasi bagi para pengunjung.

Diungkapkan politisi PDI Perjuangan itu, KB Surabaya merupakan lembaga konservasi berbentuk badan usaha yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya dan terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di bawah pembinaan dan pengawasan Direktorat

“

Ini menjadi percontohan supaya komodo kita itu betul-betul banyak sekali di sini. Kemudian bisa ditukarkan dengan kebun binatang yang tidak mempunyai koleksi Komodo

Djarot Saiful Hidayat
Anggota Komisi IV DPR RI

mengungkapkan, potensi kerugian kerusakan lahan akibat banjir bisa mencapai Rp70 milyar. Banjir berdampak pada hasil produksi padi yang tidak optimal. Padahal, saat yang sama ada kelangkaan beras.

"Nanti akan kami sampaikan kepada Menteri Pertanian. Ke depan jaringan-jaringan irigasi tersebut akan menjadi kunci bagi peningkatan produksi beras kita. Tidak selalu pupuk yang menjadi perhatian utama," ujar Budhy kepada Parlemen saat mengunjungi posko penanganan banjir di Demak, Jateng, Kamis (29/2) silam.

Politisi F-Golkar ini mengatakan, Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana dan Kementerian Pertanian sudah menyiapkan langkah-langkah perbaikan agar bisa digunakan kembali. Dengan harapan, lahan pertanian tersebut dapat kembali memberikan kontribusi terhadap produksi padi di Kabupaten Demak.

"Kami tadi juga sudah meminta agar wilayah-wilayah irigasi lainnya yang ada di Kabupaten Demak direvitalisasi, karena sangat mungkin rawan jebol ke depan. Tadi disampaikan juga oleh salah satu camat, masih banyak titik-titik yang memang memerlukan penanganan pemeliharaan. Kami sudah meminta perhatian Kementerian PUPR. Tanggul ataupun saluran irigasi ini berkontribusi



Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI, Budhy Setiawan saat mengunjungi posko penanganan banjir di Kabupaten Demak, Jateng, Kamis (29/2/2024).

terhadap produksi beras nasional kita," pungkas Budhy.

Selain itu, Legislator Dapil Jabar III ini juga meminta perhatian Pemda turut serta dalam membantu menyelesaikan permasalahan ini. Kalau jaringan irigasi primer tentu menjadi tupoksinya pemerintah pusat, tetapi jaringan anak-anak sungainya bisa menjadi perhatian Pemda.

Budidaya Durian

Di Gunung Kidul, Yogyakarta, delegasi Komisi IV menyortir soal

budidaya durian yang sedang naik daun di pasar domestik maupun internasional. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini melihat, kebutuhan dunia terhadap durian sangat tinggi. Indonesia punya banyak varian durian yang layak jual.

"Nah, itu yang menurut saya perlu dikembangkan para generasi milenial yang dikenal memiliki pemikiran dan inovasi out of the box. Jadi, negara melalui kebijakan nantinya mengayomi, mewadahi seluas-luasnya, sehingga kreativitas petani milenial terutama di sektor pertanian bisa berkembang," jelasnya di Desa Nglanggeran, Pathuk, Gunung Kidul, Yogyakarta Jumat (1/3) silam.

Politisi Fraksi PKB itu menambahkan, petani milenial harus berorientasi profit. Meningat teknologi dalam sektor pertanian lebih mudah dan beragam dalam pengembangan buah durian. "Anak muda datang saja ke perkebunan. Gunakan inovasimu, gunakan kreativitasmu, untuk mengembangkan pertanian. Dalam sejarah Indonesia, pertanian itu tidak pernah defisit, bahkan selalu menyumbang positif terhadap ekonomi," imbuhnya. gal, jk, tra/mh



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini saat mengikuti Kunker Reses Komisi IV DPR RI ke kawasan Kampung Durian, Desa Nglanggeran, Yogyakarta, Jumat (1/3/2024).

Pantai Kuta Abrasi, Stasiun Tugu Direvitalisasi

Pantai Kuta di Bali mengalami abrasi hingga 20-30 meter. Temuan ini diketahui saat Komisi V DPR RI meninjau Pelabuhan Bena dan Bandara Ngurah Rai. Tentu saja abrasi ini sangat membahayakan bagi masyarakat pesisir di Kuta, Bali.

Abrasi adalah pengikisan tanah di daerah pesisir pantai yang disebabkan oleh ombak dan arus laut yang merusak. Abrasi biasa juga disebut dengan erosi pantai. Saat delegasi Komisi V DPR yang dipimpin Ketua Komisi V DPR Lasarus, menemukan fakta pasir pantai di Kuta, Bali, telah mengalami abrasi sejak tahun lalu.

"Kami mendapatkan informasi, ada beberapa kawasan di pulau Bali ini terjadi penyusutan, karena kena abrasi sampai hampir 20-30 meter per tahun. Ini sangat berbahaya untuk pulau Bali yang begitu kecil. Kalau tidak diamankan pantainya, tentu ini sangat berbahaya," jelas Lasarus di Denpasar, Bali Senin (4/3) lalu.

Ia melanjutkan bahwa Komisi V mendorong pemerintah daerah

maupun provinsi dan kementerian terkait untuk memperhatikan serius masalah abrasi ini. Mengingat Bali adalah kawasan wisata internasional. Pantai selalu dipenuhi wisatawan lokal maupun asing. "Bali merupakan wajah Indonesia di kancah internasional. Sudah sepatutnya kita bersama stakeholder memiliki kewajiban menyokong dan mengembangkan Bali agar lebih nyaman," seru Lasarus.



FOTO: TARI/NR

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat memimpin tinjauan ke Pantai Kuta, Denpasar, Bali Senin (4/3/2024).

Lebih lanjut, Lasarus bilang, pihaknya mendorong pemerintah di Bali dan kementerian terkait memperhatikan serius persoalan ini. Semua temuan ini akan menjadi bahan pembicaraan dengan kementerian terkait.

Revitalisasi Stasiun Tugu

Di Yogyakarta, Komisi V DPR melihat Stasiun kereta Api Tugu. Ada yang harus direvitalisasi dari stasiun tersebut. PT. KAI diimbau segera merevitalisasi Stasiun Tugu agar tetap menjadi ikon yang melekat di mata para wisatawan.

Anggota Komisi V DPR, Mulyadi yang mendorong persoalan ini kepada PT. KAI. Mulyadi menyampaikan ini di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi V DPR ke Provinsi D.I Yogyakarta, Senin (4/3) lalu. Yogyakarta, katanya, adalah salah satu kota kebanggaan Indonesia, bahkan wisatawan pun hilir mudik ke kota pelajar ini. Oleh karenanya, sudah sepatutnya infrastruktur ditingkatkan demi menunjang kenyamanan masyarakat.

"Kita harus sangat fokus menunjang semua sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat dan wisatawan. Jumlah wisawatan yang masuk Yogyakarta luar biasa. Sementara Stasiun Tugu ini tidak maksimal," ujarnya.

Legislator Partai Gerindra itu kemudian menyarankan Kuala Lumpur Central sebagai percontohan revitalisasi Stasiun Tugu. Di sana, kata dia, moda transportasi sudah



FOTO: NADHEN/NR

Anggota Komisi V DPR RI, Mulyadi saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Provinsi D.I Yogyakarta.

terintegrasi dan memberikan dampak positif bagi perekonomian sekitar.

Di Stasiun Tugu sendiri, Mulyadi memperhatikan masih banyak becak hingga ojek yang tidak tertata. Hal ini menurutnya cukup mengganggu keindahan. Oleh karena itu, ia inginkan agar revitalisasi juga mengintegrasikan antarmoda transportasi yang ada di sekitar stasiun.

"Coba lihat di Kuala Lumpur Central di Malaysia, itu terintegrasi, MRT, kereta, bus, taksi segala macam itu sangat terintegrasi. Masyarakat terkonsentrasikan di sana, bahkan ada nilai tambah," ucapnya.

Masih di Yogyakarta, Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo menyoroti angka kemiskinan di

Yogyakarta yang masih tinggi. Bahkan, dari informasi yang didapatkan, kota pelajar ini menjadi yang termiskin di Pulau Jawa. Padahal, di sisi lain, berdasarkan paparan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes-PDPT), Yogyakarta jadi daerah dengan jumlah desa maju dan mandiri yang tinggi.

Karena itu, Sigit penasaran mengapa fakta ini bisa terjadi. Seharusnya, semakin banyak desa maju berbanding lurus dengan tingkat kemajuan perekonomian masyarakat. "Tadi dalam diskusi, Ibu Dirjen Pembangunan Desa mengatakan, desa-desa di Yogyakarta itu sudah level maju bahkan mandiri. Enggak ada lagi desa tertinggal. Tapi pertanyaan saya, tolong itu dikorelasikan dengan angka kemiskinan," ungkapnya di Yogyakarta, Senin (04/03/2024) lalu.

Sesuai peraturan perundang-undangan, desa merupakan mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia. Maka itu, sudah sewajarnya kemajuan desa akan memberi efek positif bagi perekonomian masyarakat. "Jadi, kalau desanya maju, otomatis kemiskinannya berkurang," jelas politisi Fraksi PKS ini.

mri, ndn/mh

“

Kita harus sangat fokus menunjang semua sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat dan wisatawan. Jumlah wisawatan yang masuk Yogyakarta luar biasa, Sementara Stasiun Tugu ini tidak maksimal

Mulyadi
Anggota Komisi V DPR RI



FOTO: RUNI/MAAN

Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak saat mengikuti pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi IV DPR RI ke Surabaya, Jawa Timur, Senin (19/02/2024).

Mengendalikan Harga Sembako Jelang Ramadan

Menyambut Ramadan pada Maret 2024, harga sembako biasanya selalu naik, menyusul permintaan yang tinggi. Komisi VI DPR RI menyerukan agar harga sembako dikendalikan.

Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mengingatkan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, agar bahan pokok, seperti beras dan minyak goreng, harus terjangkau masyarakat harganya. Selain harga, ketersediaan pangan juga harus tercukupi. Hal itu, dapat dibenahi melalui tata kelola

niaga yang baik. Sehingga, pemerintah diharapkan dapat menjalani tugas dengan baik.

"Misalnya, untuk minyak goreng produksi melimpah, namun jika ada penimbunan oleh pihak-pihak tertentu, mohon maaf (misalnya) dari pemerintah ada yang terlibat seperti kasus-kasus lalu, maka masyarakat yang jadi korban," ujarnya di Surabaya,

Jatim, usai mengikuti kunjungan kerja, Senin (19/2), lampau.

Politisi Fraksi PKS ini juga menyoroti persoalan yang sedang ramai, yaitu kelangkaan beras premium di sejumlah toko ritel modern. Bahkan, menurutnya, pedagang pasar ikut menjerit lantaran harga beras terus meroket. Menurutnya, kelangkaan beras mestinya tidak terjadi.

Kelangkaan ini mungkin juga dipicu ketidakharmonisan antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan.

"Jika (Kementan) selalu berbicara stok beras selalu cukup melebihi kebutuhan konsumsi nasional. Namun (Kemendag) bicara data, mengatakan tidak cukup, sehingga pilihan selalu impor," jelasnya.

Amin terus mempertanyakan, apakah impor beras yang dilakukan pemerintah merupakan kebutuhan atau kepentingan. Jika sebuah kebutuhan, artinya produksi dalam negeri yang dihasilkan tidak cukup. Namun, jika impor dilakukan untuk kepentingan, itu berarti terkait tahun politik.

"Jutaan ton beras harus impor, stok beras tercukupi namun harga tinggi akan sangat mengkhawatirkan apalagi sebentar lagi umat muslim akan dihadapkan bulan Ramadan dan Idulfitri yang pasti kebutuhan pangan ini menjadi bahan pokok yang harus dijamin ketersediaannya," harapnya.

Pembangunan Tol

Di Yogyakarta, Komisi VI DPR membincang pembangunan ruas Tol Yogya-Bawen dan Solo-Yogya-Kulon Progo. Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mengharapkan pembangunan jalan tol ini tidak saja akan memperlancar arus transportasi dan distribusi, namun juga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di kawasan Yogyakarta dan sekitarnya.

"Pembangunan infrastruktur transportasi seperti jalan tol memiliki efek domino terhadap perekonomian regional. Dengan memperlancar distribusi barang dan jasa, proyek ini diharapkan menstimulasi aktivitas ekonomi, mendorong investasi, dan membuka peluang kerja," ujar Aria saat memimpin pertemuan Komisi VI dengan otoritas BUMN di Yogyakarta, Selasa (20/2) silam.

Lebih lanjut, politisi Fraksi PDI Perjuangan itu mengungkapkan, sektor pariwisata, perdagangan,



Pembangunan infrastruktur transportasi seperti jalan tol memiliki efek domino terhadap perekonomian regional. Dengan memperlancar distribusi barang dan jasa, proyek ini diharapkan menstimulasi aktivitas ekonomi, mendorong investasi, dan membuka peluang kerja

Aria Bima
Anggota Komisi VI DPR RI



FOTO: PUNTHO/MAN

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat memimpin pertemuan Tim Komisi VI dengan segenap stakeholder BUMN di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (20/2/2024)

pertanian, industri manufaktur di Yogyakarta dan sekitarnya berpotensi akan mendapatkan manfaat langsung dari peningkatan aksesibilitas tersebut. Oleh karena itu, legislator dapil Jateng V ini mewanti-wanti pemerintah mengantisipasi kemacetan akibat bottleneck (penyempitan) di pintu keluar dan masuk tol termasuk di rest area.

Pembangunan Jalan Tol Ruas Yogya-Bawen dan Solo-Yogya-Kulon Progo pun terus diselesaikan pembangunannya sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pemerintah diharapkan terus berkomunikasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memastikan pembangunan berjalan dengan lancar dan berdampak positif bagi semua pihak. — rni, pun/mh

Kilang Cilacap Sumbang 60 Persen Kebutuhan Energi Jawa

Kilang minyak milik Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah, ternyata menyumbang 60 persen kebutuhan energi berupa BBM bagi pulau Jawa. Bahkan, sumbangsuhnya mencapai sepertiga kebutuhan BBM nasional. Melihat fakta ini, kilang Cilacap jadi sangat krusial dan perlu terjaga keberlangsungan produksinya.



Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto saat diwawancarai Parlementaria usai Kunjungan Kerja Reses dengan Direksi Pertamina Internasional RU IV Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (7/2/2024).

Sebagai salah satu pemasok energi nasional, tentu keandalan kilang minyak Cilacap sangat diharapkan. Inilah yang disampaikan Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat memimpin pertemuan dengan direksi Pertamina Internasional RU IV di Cilacap, Jateng. Produksi kilang ini mencapai 342 ribu barel per hari, masih di bawah kilang minyak Balikpapan yang sudah mencapai 360 ribu barel per hari.

"Cilacap adalah salah satu kilang yang sangat besar produksinya. Produksi terbesarnya 342 ribu barel per hari. Kalau kilang Balikpapan sudah berproduksi maksimal 360 ribu barel. Kilang Cilacap memproduksi sepertiga kebutuhan BBM Indonesia dan 60 persen kebutuhan pulau Jawa. Jadi penting sekali keandalan kilang

Cilacap ini," ujar Sugeng kepada Parlementaria, Rabu (7/2) lalu.

Menurut Sugeng, keandalan kilang minyak Cilacap sangat penting dalam memproduksi kuantitas BBM. Di sisi lain, kilang Cilacap juga mampu secara kualitatif memproduksi BBM ramah lingkungan. "Biofuel diproduksi dari sini dan ke depan akan menjadi prospek yang baik dalam memenuhi kebutuhan BBM. Tetapi, terus ditekan emisinya rendah karbon," harap politisi Partai Nasdem itu.

BBM rendah karbon yang diproduksi Indonesia sudah sesuai untuk kendaraan berstandar emisi gas buang Euro 5. BBM rendah karbon tersebut memiliki ron 92 ke atas. Disampaikan legislator dapil Jateng VIII (Cilacap, Banyumas)

ini, BBM yang rendah karbon sudah menjadi tren dunia, lantaran digunakan oleh banyak jenis kendaraan bermotor yang menyumbang emisi karbon sangat besar.

"Kita sepakat net zero emissions di tahun 2060. Maka seluruh infrastruktur tentang energi terus menerus kita mitigasi termasuk di Cilacap ini, apakah dalam berproduksi menerapkan ESG (environment, social, and governance). Itu sebagai syarat bagaimana sebuah industri atau sebuah publikasi memenuhi kaidah-kaidah yang dipersyaratkan menyangkut tata lingkungan, berapa besar melepaskan karbon," ulas Sugeng.

Teknologi Lifting

Penerapan teknologi tinggi perlu kembali dilakukan untuk

meningkatkan lifting minyak. Inilah yang menjadi isu penting saat delegasi Komisi VII DPR RI berkunjung ke PT. Pertamina EP di Surabaya, Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi VII Bambang Haryadi yang mendorong penguatan teknologi agar ada penambahan jumlah sumur dalam memproduksi lifting minyak.

"Terutama selain penambahan sumur juga peningkatan teknologinya. Kita masih melihat bahwa penggunaan teknologi di sektor hulu ini masih agak telat. Makanya kita mendorong ada peningkatan teknologi untuk meningkatkan produksi lifting itu sendiri," jelas Bambang di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (7/2) silam.

Selain peningkatan teknologi dan jumlah sumur, Bambang juga berharap ada restrukturisasi organisasi di Pertamina untuk memaksimalkan kinerja. Dengan reorganisasi diharapkan berdampak pula pada target lifting tahun 2024. Pada bagian lain, Bambang juga mendorong agar berbagai keterlambatan dalam proyek-proyek strategis di PT Pertamina Hulu Energi bisa diselesaikan dengan baik.

"Salah satunya dengan meringkas atau mempercepat proses



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Edy Soeparno mengapresiasi kinerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam mengelola Kebun Raya Bogor

tender-tender di sektor hulu. Karena kita melihat akibat keterlambatan itu terjadi penurunan dari target yang kita tetapkan 2023 kemarin. Harapan kita di 2024 khususnya pasca pemilu, PHE jauh lebih gesit melaksanakan target-target yang sudah ditentukan bersama," tutupnya.

Kebon Raya Bogor

Sementara di Bogor, Jawa Barat, delegasi Komisi VII DPR RI menyorot soal pengelolaan Kebon Raya Bogor (KRB) oleh Badan Riset

dan Inovasi Nasional (BRIN). Idealnya, KRB menjadi pusat penelitian dan konservasi tumbuhan.

"Kami sangat mengapresiasi BRIN dalam mengelola Kebun Raya Bogor ini. Peralannya, sebagaimana diketahui kebun raya tertua di Indonesia ini selain sebagai tempat wisata, juga berhasil menjadi tempat riset dan konservasi berbagai sumber daya alam hayati," ujar Eddy Soeparno saat memimpin kunjungan kerja ke KRB, Jawa Barat, Rabu (7/2) lalu.

Menurut Eddy, pusat konservasi ini menghadapi tantangan perubahan iklim dan eksploitasi yang masif. Ia memberi beberapa catatan untuk BRIN dalam pengelolaan KRB ini. Salah satunya terkait keluhan masyarakat soal harga yang cukup mahal dari resto yang ada di KRB tersebut.

Politisi Fraksi PAN ini berharap, resto atau cafe yang berada di KRB yang berada di bawah pengelolaan BRIN menerapkan harga yang terjangkau. Mengingat, pengunjung tempat wisata tersebut juga berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko setuju harga yang terjangkau pada resto yang beroperasi di KRB. Itu masih sangat mungkin diturunkan, agar pengunjung semakin bertambah," jelas Laksana.

mh, syn, ayu/mh



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin Pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR dengan PT. Pertamina EP, di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (7/2/2024).

Menyukseskan Pelaksanaan Haji 2024



Ketua komis VIII DPR RI Ashabul Kahfi.

Turut menyukseskan pelaksanaan ibadah haji tahun 2024, Komisi VIII DPR RI mengawasi persiapan, pelaksanaan ibadah haji 2024 di wilayah Sulawesi Selatan. Salah satu yang menjadi perhatian Komisi VIII ialah pelunasan biaya haji.

Pasalnya, hingga kini masih banyak jemaah yang belum melakukan pelunasan. Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi optimistis para jemaah dapat sepenuhnya melakukan pelunasan pada tahap dua. "Yang pertama kita ingin memastikan persiapan penyelenggaraan haji tahun 2024. Karena sekarang, kan, sudah berada

di proses pendaftaran. Nah, kita ingin memastikan seperti apa proses pendaftarannya? Sudah berapa persen capaiannya?" ujar Kahfi kepada Parlementaria di Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu (7/2) silam.

Saat ini pelunasan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2024 menurut Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama tercatat telah ada lebih dari 147 jemaah yang sudah melakukan pelunasan dan Provinsi Sulawesi Selatan masuk ke dalam lima provinsi

“

Dalam ruang kerja kami yang bermitra dengan Kementerian Sosial kluster kemiskinan ekstrem belum dibahas bersama. Bagaimana munculnya kategori kemiskinan ekstrem, penetapan hingga verifikasi datanya kami belum bahas

Diah Pitaloka
Anggota Komisi VIII DPR RI

yang telah banyak melakukan pelunasan, yakni sejumlah 4.203 jemaah.

"Karena ini, kan, masih panjang. Makanya kemarin kita membuat keputusan BPIH itu lebih cepat. Tujuan utamanya memberikan kesempatan untuk calon jemaah mempersiapkan biaya-biaya mereka yang akan digunakan untuk pelunasan. Memang sampai hari ini belum tercapai sepenuhnya, tapi insyaallah di tahap dua akan selesai," jelasnya.



FOTO: RIA/NR

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka saat menyalurkan bantuan sosial di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VIII di Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/2/2024).

Lebih lanjut, legislator Dapil Sulawesi Selatan I itu juga berharap, proses penyelenggaraan haji 2024 dapat berjalan lancar dengan memperbaiki hal-hal yang perlu dievaluasi dari penyelenggaraan sebelumnya. Seperti screening kesehatan bagi para calon jemaah haji serta pendamping haji untuk calon jemaah haji lansia atau yang membutuhkan.

Sementara Tim Kunjungan Komisi VIII ke Jawa Barat yang dipimpin Diah Pitaloka menyoroti pembagian bantuan sosial (bansos) pangan yang diberikan untuk kelompok masyarakat miskin ekstrem di Jawa Barat, yang penyalurannya bukan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Dijelaskan Diah, berdasarkan informasi Dinas Sosial Jabar, penyaluran bansos pangan khusus kelompok miskin ekstrem menggunakan Data Pensasaran

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

"Dalam ruang kerja kami yang bermitra dengan Kementerian Sosial kluster kemiskinan ekstrem belum dibahas bersama. Bagaimana munculnya kategori kemiskinan ekstrem, penetapan hingga verifikasi datanya kami belum bahas," katanya saat memimpin tim kunjungan kerja reses Komisi VIII di Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/2) silam.

Diah mengatakan informasi ini menjadi catatan penting bagi Komisi VIII untuk segera dibahas mengenai pemisahan antara kluster miskin dan miskin ekstrem. "Sebaiknya segera dibahas karena berhubungan dengan langkah-langkah yang lebih efektif dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan penyaluran bansos," tutupnya.

gal, rnm/mh

Bintan Butuh Dukungan Bangun Sektor Kesehatan



FOTO: ANILU/VR

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena saat memimpin Rapat Kunjungan Kerja Masa Reses Komisi IX DPR RI di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (28/02/2024).

Untuk memperkuat layanan kesehatan di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, dukungan kebijakan dari pusat perlu diberikan. Bintan membutuhkan tambahan infrastruktur dan tenaga kesehatan.

Otoritas Pemda Bintan dalam pertemuannya dengan delegasi Komisi IX meminta dukungan pembangunan sektor kesehatan, bahkan ketenagakerjaan. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan kesehatan maupun ketenagakerjaan di Bintan.

"Kabupaten Bintan meminta dukungan pemerintah pusat menyangkut tenaga kesehatan dan SDM kesehatan. Misalnya, dokter,

dokter ahli yang mereka sangat butuhkan, untuk bisa memperkuat layanan kesehatan di sini," kata Melki sapaan akrab Melkiades usai memimpin pertemuan dengan Pemda Kabupaten Bintan, Kepri, Rabu (28/2) silam.

Dalam konteks kesehatan, politisi Partai Golkar itu menyoroti kebutuhan dokter dan tenaga medis terampil untuk memperkuat layanan kesehatan di Kabupaten Bintan. Selain itu, pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) yang berkualitas juga dibutuhkan untuk mendukung sektor ketenagakerjaan di daerah tersebut.

Bintan merupakan daerah kepulauan. Moda transportasi sungai dan laut dibutuhkan untuk mobilitas tenaga kesehatan, agar masyarakat juga bisa mengakses layanan kesehatan dengan baik.



Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh saat memimpin kunker reses Komisi IX di Batam, Kepri, Rabu (28/2/2024).



**Kabupaten
Bintan meminta
dukungan
pemerintah
pusat
menyangkut
tenaga
kesehatan dan
SDM kesehatan.
Misalnya, dokter,
dokter ahli yang
mereka sangat
butuhkan, untuk
bisa memperkuat
layanan
kesehatan di sini**

Emanuel Melkiades Laka Lena
Komisi IX DPR RI

Melki menyatakan, kelak anggaran dari APBN bisa mendukung pembangunan sektor kesehatan dan ketenagakerjaan di Bintan.

Sementara di Kota Batam, Kepri, Komisi IX DPR mengapresiasi capaian pembangunan sektor kesehatan dan ketenagakerjaan. Capaian itu mendongkrak indeks pembangunan manusia (IPM) Kepri. Pada 2023 IPM Kepri mencapai 79,08 persen, meningkat 0,6 poin dari tahun sebelumnya, 2022. Kepri sendiri telah mencapai cakupan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) dengan capaian kepesertaan JKN mencapai 96 persen pada 2023.

Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh yang memimpin pertemuan dengan Pemkot Batam, menyatakan, capaian UHC itu harus dibarengi dengan kemudahan akses dan peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. "Capaian UHC ini harus dibarengi dengan kemudahan akses dan peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat," harap Ninik sapaan

akrab Nihayatul Wafiroh di Batam, Kepri, Rabu (28/2) lampau.

Lebih lanjut, Ninik juga mengapresiasi percepatan penurunan angka stunting di Kepri, yaitu di angka prevalensi stunting sebesar 15,4 persen pada tahun 2022. Dari angka tersebut, Kepri menduduki peringkat ke-4 terendah nasional setelah Lampung, DKI Jakarta, dan Bali. Ia pun mendorong akselerasi yang lebih cepat dalam penurunan stunting di Kepri.

"Kami tentu mendukung penuh komitmen Pemerintah Kepulauan Riau dan Kota Batam untuk membentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan di Sekupang guna mengembangkan potensi medical tourism di Kepulauan Riau," lanjut politisi Fraksi PKB ini.

Sedangkan pada bidang ketenagakerjaan, Komisi IX sendiri mencatat perlu ada perbaikan capaian di Kepri khususnya keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Untuk itu, Pemda Kepri terus didorong agar KEK dan investasi yang ada di Kepri dapat menjadi bagian dari strategi penyerapan tenaga kerja. **aas, bia/mh**

Mengapresiasi SMKN 2 Pengasih, Kulon Progo



FOTO: SINGGIH/NR

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi saat meninjau SMK Negeri 2 Pengasih, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Saat berkunjung ke SMKN 2 Pengasih di Kulon Progo, Yogyakarta, banyak keunggulan yang diperlihatkan sekolah ini. SMKN 2 Pengasih layak mendapat predikat A. Selain aset, metode pengajaran, dan peralatan sekolah sangat baik dan lengkap.

Kunjungan ke SMKN 2 Pengasih ini dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf. Ia mengapresiasi keunggulan SMK ini yang telah menampilkan wajah sekolah yang ideal. "Dari sisi asetnya, peralatannya, pengajarannya, dan kerja sama dengan industri, SMK Negeri 2 Pengasih bisa dikatakan sudah cukup

lengkap. Ini bukan prestasi yang bisa diraih oleh semua SMK. Apalagi, SMK ini merupakan pusat keunggulan," ujar Dede di Kulon Progo, Yogyakarta, Selasa (27/2) lalu.

Ia berharap, semua SMK di Tanah Air perlu mencontoh SMKN 2 Pengasih. Setiap SMK mestinya bisa mencapai standar yang sama dengan SMK Negeri 2 Pengasih. Berdasarkan data

Badan Pusat Statistik (BPS), lulusan SMK sebagai salah satu penyumbang pengangguran di DIY, tidak sepenuhnya keliru. Lantaran kondisi SMK saat ini masih kurang memadai.

"Dulu, saat program SMK Bisa digiatkan, banyak yang hanya mendirikan SMK di ruko-ruko tanpa peralatan yang memadai. Inilah yang menyebabkan SMK dianggap sebagai penyumbang pengangguran. Namun, kita harus melihat bahwa ada SMK seperti Negeri 2 Pengasih yang berhasil menjadi pusat keunggulan," ungkap Dede.

Dalam menghadapi masa depan, Dede menekankan pentingnya mendukung program-program yang dapat menjembatani SMK dengan

dunia industri. "Kita perlu mendorong berbagai program agar SMK tetap terhubung dan sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Ini penting untuk menciptakan lulusan SMK yang siap bersaing di pasar kerja," ungkap politisi Partai Demokrat itu.

Wisata Bantul

Masih di Yogyakarta, delegasi Komisi X DPR dipimpin Abdul Fikri Faqih menilai, Kabupaten Bantul memiliki potensi wisata yang besar dan menarik. Namun, ia menyayangkan kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap destinasi wisata tersebut. Ia pun meminta pemerintah memberi perhatian serius pada destinasi wisata potensial, di luar prioritas dan superprioritas.

"Pemerintah sudah membuat destinasi wisata prioritas, kemudian dikecilkan lagi menjadi destinasi superprioritas. Sehingga, akhirnya seperti Yogya, apalagi Bantul, dan sebagainya, tidak mendapatkan perhatian secara serius, paling tidak sampai ke level budgeting," terangnya kepada Parlemen di Bantul, Yogyakarta, Selasa (27/2) silam.

Politisi Fraksi PKS itu lantas menyampaikan hasil survei Kementerian Pariwisata bahwa wisatawan yang mau datang ke



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih.

Indonesia mayoritas ingin berwisata ke Bali dan Yogyakarta. "Saya kira harus move on, harus sudah bergerak. Tidak hanya destinasi prioritas dan super prioritas saja (yang diurus), tapi destinasi (wisata potensial) seperti sekarang ini," tuturnya.

Atas hal itu, ia pun mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bersama-sama mendorong destinasi wisata potensial, seperti Bantul agar layak dikunjungi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.

Kenakalan Remaja

Sementara itu di Sleman, Yogyakarta, Anggota Komisi X DPR Nuroji menyorot soal kenakalan

remaja yang marak terjadi. Ia sangat memprihatinkan kondisi ini. Nuroji menyerukan kasus-kasus kenakalan remaja agar segera diredam. Hal ini disampaikan Nuroji saat menggelar pertemuan dengan Bupati Sleman, Selasa (27/2) silam.

"Salah satu upaya pencegahan yang bisa dilakukan adalah strategi pemajuan kebudayaan untuk meredam pengaruh budaya luar dengan mengenalkan budaya sendiri melalui taman budaya, lembaga-lembaga kebudayaan, museum kepada para remaja. Pembinaan ini menjadi dasar membentuk karakter pemuda kita yang selama ini banyak terpengaruh oleh budaya negara lain," tandas Nuroji.

Politisi Partai Gerindra ini mencontohkan seni bela diri pencak silat yang merupakan tradisi bangsa kita. Bila dikenalkan pada generasi muda, pasti ada pelajaran tentang sportivitas, kedamaian, dan setia kawan. Bukan malah menimbulkan permusuhan.

"Kegiatan positif seperti seni beladiri pencak silat bisa menjadi alternatif bagi para remaja untuk menyalurkan energi dan waktu luangnya, sehingga akan mengurangi kecenderungan bertindak negatif," ujarnya.

skr, srw, oji/mh



“
Salah satu upaya pencegahan yang bisa dilakukan adalah strategi pemajuan kebudayaan untuk meredam pengaruh budaya luar

Nuroji
Anggota Komisi X DPR RI

Melihat Komitmen Himbara Hidupkan UMKM

Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) mendapat apresiasi dari Komisi XI DPR RI yang telah berkomitmen membantu menghidupkan sektor UMKM. Setidaknya inilah yang terlihat di Tangerang Selatan, Banten, saat Komisi XI meninjau UMKM binaan Himbara.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara menilai, Himbara telah menunjukkan

komitmen nyata melakukan pembinaan UMKM. Hal itu disampaikan Amir di sela-sela memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) Tim Komisi XI DPR RI untuk meninjau beberapa stan produk dari UMKM yang dibina oleh Himbara.

Amir menjelaskan beberapa UMKM tersebut mendapatkan bantuan pembiayaan, mulai dari Rp2 juta hingga Rp200 juta untuk menjalankan roda ekonomi. "Ini adalah bukti bahwa teman-teman perbankan, selama ini terus melakukan pembinaan terhadap UMKM kita. Pembinaan yang



FOTO: RDN/IMAN

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara di sela-sela memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) Tim Komisi XI DPR RI meninjau beberapa stan produk dari UMKM yang dibina oleh Himbara di Kota Tangerang, Banten, Rabu (31/1/2024).



FOTO: HIMBA/ANR

Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea (Kiri) bersama Hendri, salah satu masyarakat yang membuka stand UMKM dalam Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI di Serpong, Tangerang.

“

Ini adalah bukti bahwa teman-teman perbankan, selama ini terus melakukan pembinaan terhadap UMKM kita. Pembinaan yang dilakukan baik dalam model bantuan pembiayaan maupun dalam bentuk pembinaan khusus

Amir Uskara
Anggota Komisi XI DPR RI

dilakukan baik dalam model bantuan pembiayaan maupun dalam bentuk pembinaan khusus,” ujar Amir di Tangerang Selatan, Banten, Rabu (31/1) silam.

Beberapa stan binaan Himbara turut diperkenalkan dalam agenda ini. Di antaranya, Hot Sambal Bumbu, Dapoer Djeng Ani, dan DNS Artwork binaan Bank Mandiri melalui Program KUR, serta Neng Kriwil Cemilan Kriuk Enak binaan Bank BRI.

Amir menjelaskan sebagian besar sudah melakukan ekspor, baik dari hasil kerajinan maupun produksi UMKM. Oleh karena itu, Komisi XI berharap agar seluruh stakeholder terkait dapat mengembangkan UMKM. Karena bagaimanapun situasinya UMKM adalah sumber atau motor pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Di tempat yang sama Anggota Komisi XI lainnya, Marinus Gea mengaku senang dan mendukung UMKM, khususnya yang ada di wilayah dapilnya, Banten III (Tangerang Raya). Menurutnya, UMKM menjadi

modal untuk membangun ekonomi kerakyatan, khususnya UMKM di Banten.

“Hari ini kita melihat pameran UMKM binaan Bank Indonesia, binaan BNI, Bank Mandiri. Kemudian kita melihat ada UMKM-UMKM yang unik. Keunikannya punya nilai plus ya, nilai tambah yang luar biasa sehingga produknya pun bisa diekspor. Dan BNI juga luar biasa untuk support-nya,” ujar Marinus di Gading Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (31/1) lalu.

Faizal Arief Setiawan Pemimpin BNI Wilayah 14 mengungkapkan, perhatian terhadap UMKM merupakan tugas dari Komisi XI untuk going global. BNI dengan produk Xpora mendukung pengusaha UMKM go global melalui bunga yang spesial, dan menghadirkan jaringan kantor cabang di luar negeri guna mendukung pemasaran UMKM.

“Jadi clear sekali dukungan dari Pak Marinus dan teman-teman DPR RI kepada kami yang ujungnya kami salurkan ke teman-teman pengusaha,” ujar Faizal. — hal, rdn/mh

Pinjol Bidik Perguruan Tinggi

Para mahasiswa yang kesulitan membayar uang kuliah diberi akses pinjaman online (pinjol) untuk melunasinya. Beberapa kampus negeri ternama menawarkan pinjol ini kepada para mahasiswa dengan bunga tinggi. Solusi atau malapetaka?

BIAYA uang kuliah tunggal (UKT) semakin tinggi, mahasiswa pun semakin terhimpit. Akses pendidikan mestinya bisa dinikmati setiap warga negara. Konstitusi menjamin hal itu. Namun, tak senada dengan kenyataan. Sejak Kemendikbudristek menetapkan perguruan tinggi masuk ke dalam kategori Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), biaya UKT secara absolut ditentukan oleh PTN berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).

Kebijakan ini menyebabkan golongan mahasiswa tidak mampu kesulitan membayar UKT. Para mahasiswa Institusi Teknologi Bandung (ITB), misalnya, memprotes tawaran kampus mengakses pinjol untuk membayar UKT. Bunga pinjol juga ternyata cukup tinggi, 20 persen. Idealnya, para mahasiswa yang kesulitan membayar UKT diberi solusi berupa beasiswa atau subsidi.

Tawaran ini menuai sorotan tajam publik sekaligus Komisi X DPR yang mewakili rakyat di bidang pendidikan. Ketua Komisi X DPR RI Syaiful



FOTO: DEP/ANR
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda

Huda meminta pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi (Kemendikbudristek) mengkaji ulang konsep pendanaan PTN-BH, yang bekerja sama dengan pinjol untuk pembayaran UKT.

Dirinya membenarkan bahwa PTN-BH memiliki kewenangan dalam menentukan UKT bagi para mahasiswa mandiri. Kendati demikian, merujuk Pasal 65 ayat 4 UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, PTN-BH harus menentukan UKT yang terjangkau masyarakat.

"Kami menilai skema cicilan UKT dengan pinjol ini merupakan shortcut yang merugikan mahasiswa. Bagi mahasiswa yang tidak mampu, mereka terpaksa mengambil opsi ini, bagi mahasiswa nakal opsi ini bisa disalahgunakan untuk kepentingan lain. Ujungnya, mahasiswa dan wali mahasiswa yang dirugikan," tanggap politisi Fraksi PKB itu.

Menurutnya, jika pihak kampus ingin menerapkan sistem pembayaran UKT dengan konsep 'student loan' seharusnya tidak mencari keuntungan dari mahasiswa yang berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah. Perlu diketahui, 'student loan' merupakan skema pinjaman biaya pendidikan untuk menempuh perguruan tinggi dan/atau biaya hidup.

Pinjaman pendidikan tersebut bisa dibayar setelah mahasiswa lulus dari perguruan tinggi atau setelah mahasiswa bekerja. Pelunasannya bisa melalui cicilan yang jumlahnya disesuaikan dengan gaji peminjam. Sejumlah negara yang telah menerapkan 'student loan' adalah Selandia Baru, Perancis, Jerman, dan Amerika Serikat.

Bukan Ladang Bisnis

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengingatkan

PTN-BH bahwa dunia pendidikan bukan ladang bisnis. Pembayaran UKT via pinjol dinilai tidak pantas karena mengambil keuntungan dari mahasiswa yang terhimpit masalah ekonomi, apalagi memberi tarif bunga pinjaman hingga 20 persen.

Negara seharusnya hadir untuk melakukan intervensi. Oleh karena itu, politisi Fraksi Demokrat itu mengusulkan Kemendikbudristek membuat regulasi terkait isu tersebut dan memperkuat pengawasan. Ia juga menjelaskan jika kampus ingin menerapkan konsep 'student loan', kampus PTN-BH seharusnya bekerja sama dengan bank negara dan tidak memungut keuntungan melalui bunga.

"Ini harus segera dipikirkan, ini PR bagi Menteri Pendidikan agar bisa memberikan instruksi kepada kampus-kampus untuk segera membuat yang namanya student loan, ini tidak boleh berupa pinjol. Kalau pinjol ini, sekarang kita tahu lebih banyak mudharat, daripada manfaatnya," pungkasnya.

Revisi Anggaran Pendidikan

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mempertanyakan sikap pemerintah yang membiarkan



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi

mahasiswa terlilit utang demi mencicil pembayaran UKT. Ia pun menyayangkan sikap perguruan tinggi yang memberikan opsi pinjol kepada mahasiswa.

Baginya, opsi membayar dengan pinjol bukan keputusan yang bijaksana karena konstitusi menyebutkan bahwa pendidikan adalah tugas negara. Terbukti, kewajiban negara ini tercantum pada pasal 31 ayat 1-5 UUD NRI Tahun 1945. Tidak ingin berpolemik berkepanjangan, ia mengusulkan

pembaharuan struktur dan formula anggaran pendidikan.

"Maka, menurut saya, perlu diadakan diskusi kembali tentang struktur dan formula anggaran pendidikan yang 20 persen, yaitu sebesar Rp660 triliun itu ke mana saja. Kenapa harus membiarkan problem seperti solusi membayar UKT dengan skema pinjol ini muncul?" ungkap Fikri. seraya menambahkan, "Saya berharap mudah-mudahan nanti ada solusi supaya tidak sampai pinjol untuk pendidikan."

Perlu diketahui, anggaran pendidikan yang diambil dari APBN sebesar 20 persen lebih besar dikelola oleh pemerintah daerah, dibandingkan oleh pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek. Jika menggunakan data Neraca Pendidikan Daerah (NPD) yang disusun oleh Kemdikbudristek, pemerintah daerah kerap mengabaikan amanat konstitusi ini.

Banyak pemerintah daerah hanya mengalokasikan anggaran pendidikan bahkan kurang dari 1 persen tanpa transfer daerah. Sebab itu, Fikri menegaskan pemerintah harus berkomitmen menyelesaikan isu ini. **ts/mh**



Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih.

Mengundang AIPA, Menyaksikan Pemilu Indonesia

Election Visit Program (EVP) atau program pemantauan pemilu sudah jadi tradisi bagi semua anggota ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA). DPR RI pun menunjukkan komitmennya, selalu mengundang observer AIPA melihat pemilu Indonesia dari dekat.



FOTO: WILGA/NIR

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana saat diwawancarai Parlemenaria usai Focus Group Discussion (FGD) terkait sistem dan penyelenggaraan pemilu 2024, di Bali, Selasa (13/2/2024).

PROGRAM EVP ini digelar di Bali dan diawali dengan Focus Group Discussion. Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana, menyampaikan,

DPR ingin memperlihatkan kepada dunia transparansi demokrasi di Tanah Air. Putu juga menegaskan bahwa EVP sangat penting untuk menunjukkan komitmen Indonesia untuk terus mendorong agenda global, salah satunya sustainable development

goals yang bertujuan mengembangkan pembangunan berkelanjutan dalam konteks demokrasi.

"Demokrasi ini sangat penting untuk kita kawal dan memang kita terus ingin membangun indeks demokrasi yang baik. Jika kita lihat di ASEAN, demokrasi kita termasuk sangat baik dari beberapa negara seperti Filipina dan Malaysia. Indonesia tentu menjadi contoh bagaimana demokrasi itu harus terus dibangun. Dan ini tentu ujungnya akan memberikan kesempatan dan kesejahteraan kepada rakyat," katanya Putu pertengahan Februari silam.

Putu menilai, EVP 2024 ini menjadi momentum baik untuk negara-negara lain mengenal lebih dekat Indonesia. Lewat kerja sama bilateral ini akan mudah terjalin jika ada kedekatan antarnegara.

“

mereka juga ikut meninjau langsung proses pemungutan dan penghitungan suara di tiga lokasi di Provinsi Bali,

Robert Rouw
Wakil Ketua Komisi V DPR RI

"Saya yakin segala kerja sama ke depan akan berjalan lebih baik lagi kalau mereka lebih mengenal kita, kita lebih mengenal mereka. Nah, personal cooperation dan relationship-nya penting. Harapannya terbangun dengan baik hubungan antarbangsa,



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana (dua dari kanan) di sela-sela Program Pemantauan Pemilu atau Election Visit Program (EVP) 2024 di Bali, Denpasar, Selasa (13/2/2024).

antarnegara, dan demokrasi adalah salah satu cara untuk mendekatkan bangsa-bangsa di dunia," jelas Anggota Komisi VI DPR RI ini.

Ada 17 negara dan tiga organisasi internasional yang mengikuti FGD sistem dan penyelenggaraan Pemilu 2024. Kegiatan yang diselenggarakan dua hari (13-14 Februari) itu menghadirkan pemateri Ketua KPU 2012-2017 Hadar Gumay, Ketua KPU 2017-2022 Arief Budiman, Anggota DKPP 2022-2027 I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Ketua Perludem Titi Anggraini, dan penyelenggara pemilu di Provinsi Bali.

Selain itu, mereka juga ikut meninjau langsung proses pemungutan dan penghitungan suara di tiga lokasi di Provinsi Bali, yaitu di Desa Penglipuran, Jimbaran, dan kawasan Garuda Wisnu Kencana. Putu menjelaskan, ketiga TPS yang telah

ditunjuk mempunyai keunikannya tersendiri.

"Ada tiga kunjungan ke TPS, satu itu di desa wisata Penglipuran, sangat indah desanya, sudah sering mendapatkan penghargaan dari berbagai organisasi internasional. Yang kedua di Jimbaran, itu juga sebuah desa wisata yang sering menghadirkan kuliner, fresh seafood. Yang ketiga adalah di sebuah SD, di kawasan GWK. Jadi artinya, dalam momen ini, mereka bisa langsung hadir ke TPS sambil menikmati keindahan alam," jelasnya.

Pelaksanaan EVP 2024 di Bali ini bisa mendapatkan tiga keuntungan sekaligus. Pertama, melihat pemilu yang transparan. Kedua, bisa langsung berinteraksi melihat budaya Bali. Ketiga, melihat keindahan alam dan pariwisata Bali. Hal yang sama disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar. Katanya,

Bali sebagai tempat EVP 2024 sangat strategi untuk mempromosikan wisata Indonesia kepada dunia.

"Memang kita memilih Bali, sekaligus sebenarnya kita ingin memperlihatkan bagaimana mekanisme pemilu yang dilakukan dengan sangat tertib. Ada KPPS-nya terdiri dari perempuan semua (TPS 19 di Jimbaran), dan ini bagian dari strategi kita untuk terus mempromosikan wisata Indonesia kepada orang-orang luar," jelasnya

Ia juga mengatakan EVP ini adalah sebuah momen penting bagi Indonesia untuk menunjukkan bagaimana besar dan demokratisnya Indonesia di mata dunia. "Jadi saya kira ini pengalaman untuk EVP. Ini adalah kesempatan saling bertukar pikiran dengan negara-negara anggota IPU yang berkaitan dengan fungsi parlemen," pungkasnya.  rnm/mh



DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)



Marsiaman Saragih

Salurkan Bantuan Alat Pertanian

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Marsiaman Saragih menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dari corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). Alsintan tersebut diberikan kepada Kelompok Tani Beken Jaya Banai Kecil di Riau.



FOTO: IST/NR

Anggota DPR RI Marsiaman Saragih saat menyalurkan bantuan alsintan dari corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI).

“R ESES kali ini saya salurkan bantuan alat pertanian kepada Kelompok Tani Beken Jaya Banai Kecil sebagai respon dari permintaan masyarakat yang membutuhkan alat tani untuk keperluan bertani,” kata Marsiaman di Desa Benai Kecil, Kecamatan Benai pertengahan Februari lalu.

Legislator dapil Riau II ini berharap, bantuan alsintan ini mampu

mendorong pengembangan pertanian masyarakat. Negara lain, katanya, sudah sangat maju pertaniannya. Bahkan, untuk pertanian padi, mereka sudah bisa tanam empat kali tanam. Ini karena didukung oleh teknologi modern yang mereka gunakan.

Indonesia sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo, bisa surplus untuk pangan beras. Ke depan, PDI Perjuangan tetap konsisten memperjuangkan nasib

masyarakat yang bergerak di semua sektor termasuk sektor pertanian di Kuansing.

Kepala Desa Benai Kecil, Irfan dan kelompok tani Beken Jaya, menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga atas perjuangan PDI Perjuangan Kuansing untuk petani dan masyarakat Benai Kecil. “Kami sangat bersyukur dengan bantuan ini. Ini akan sangat membantu masyarakat kami,” kata Irfan.  tn/mh

Delia Pratiwi

Sosialisasi Pengawasan Obat dan Makanan

Ratusan masyarakat di Kecamatan Stabat, Langkat, Sumatera Utara, menghadiri sosialisasi pengawasan obat dan makanan (POM) yang dilakukan Anggota Komisi IX DPR RI Delia Pratiwi Sitepu.



FOTO: IST/NR

Anggota DPR RI Delia Pratiwi Sitepu saat sosialisasi pengawasan obat dan makanan (POM).

ACARA sosialisasi ini bekerja sama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Medan. Kegiatan ini dilaksanakan di dua titik di Desa Pantai Gemi dan di Kelurahan Kwala Bingai, Stabat. Delia menyampaikan edukasi pengawasan obat dan makanan termasuk pengawasan penggunaan kosmetik.

Legislator dapil Sumut III itu menyampaikan kepada masyarakat

bahwa penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya rentan dialami oleh para wanita yang kurang memperhatikan bahan-bahan berbahaya yang terkandung dalam kosmetik. Ia pun mengimbau masyarakat memperhatikan bahan-bahan yang terkandung dalam kosmetik, serta selalu mengecek keamanan kosmetik yang digunakan.

Sementara itu, Camat Kecamatan Stabat Eko Winarno mengungkapkan rasa terima

kasihnya atas sosialisasi yang diberikan. Ia berharap edukasi yang diberikan dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

"Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti dapat diterima dengan baik dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Apa yang disampaikan Ibu Delia dan Balai BPOM kiranya dapat membawa perubahan bagi masyarakat di desa kami," harapnya.  **bia/mh**

Mulyadi

Menyiapkan Infrastruktur Kabupaten Bogor

Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat V Mulyadi mengungkapkan, Kabupaten Bogor memiliki banyak persoalan pembangunan, mulai dari masalah jalan tambang di Bogor Barat hingga pembangunan jalur Puncak Dua.

PERNYATAAN tersebut dia ungkapkan saat menghadiri diskusi publik yang diselenggarakan Jaringan Jurnalis Bogor (JJB) di lobby Gedung DPRD Kabupaten Bogor, akhir Januari 2024 lalu. Dia berharap, Kementerian PUPR, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Perhubungan bisa memberikan solusi pembenahan pembangunan di dapilnya.

"Saya berada di Komisi V DPR RI yang bermitra dengan Kementerian PUPR, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Perhubungan siap menghadirkan kementerian tersebut di Kabupaten Bogor," papar Mulyadi.

Pada kesempatan diskusi tersebut, turut mengundang sembilan Anggota DPR RI Dapil Kabupaten Bogor, namun hanya dihadiri tiga saja. Mulyadi pun menyayangkan PJ Bupati Bogor yang



FOTO: ARIEF/NR

Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi.

“

Dengan adanya diskusi ini dan duduk bersama, maka kekuatan politik para anggota legislatif DPR RI di Kabupaten Bogor bisa mempercepat solusi permasalahan yang ada di Kabupaten Bogor

Mulyadi
Anggota Komisi V DPR RI

tidak hadir. Padahal, menurutnya kesempatan tersebut adalah momen penting membangun sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Dengan adanya diskusi ini dan duduk bersama, maka kekuatan politik para anggota legislatif DPR RI di Kabupaten Bogor bisa mempercepat solusi permasalahan yang ada di Kabupaten Bogor," ujar politisi Fraksi Partai Gerindra. 

Robert Rouw Beri Bantuan Bus



FOTO: IST/WR

Anggota DPR RI Robert Rouw saat menyerahkan bantuan tiga bus aspirasi di Papua.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Robert Rouw menyerahkan bantuan tiga bus aspirasi ke dua kampus dan satu panti asuhan di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua.

DALAM kesempatan tersebut Robert Rouw mengatakan, bantuan bus sekolah itu merupakan program aspirasi yang ada di Komisi V DPR RI melalui Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI untuk yayasan-yayasan pendidikan yang ada di Tanah Papua.

"Kami hadir di Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen (YPPK) dan Panti Asuhan Kerahiman Hawaii Sentani. Nah, tadi kita lihat keceriaan anak-anak

“

kita lihat keceriaan anak-anak panti asuhan ketika mendapatkan bus sekolah

Robert Rouw
Wakil Ketua Komisi V DPR RI

panti asuhan ketika mendapatkan bus sekolah, sehingga saya sangat berterimakasih dengan program yang kami perjuangkan melalui Komisi V DPR RI ini," ungkap

Legislator Papua ini, berjanji akan terus memperjuangkan bantuan semacam itu, karena masih banyak masyarakat, khususnya anak-anak di Papua, mulai tingkat sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi yang membutuhkan alat transportasi.

Penyerahan bus yang dilakukan bersama Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw (Fraksi NasDem) itu, ke Kampus Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) Fajar Timur dan Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) IS *Kajine* Kota Jayapura serta ke Panti Asuhan Kerahiman Hawaii Sentani.  **rdn/mh**

Ruslan M. Daud

Tinjau Lokasi Pembangunan Jalan

Program pemerintah pusat yang ingin membangun jalan di beberapa wilayah, mendapat perhatian anggota DPR RI. Di Aceh, rencana pembangunan jalan juga akan dibangun. Inilah yang menjadi perhatian Anggota Komisi V DPR RI Ruslan M. Daud.

POLITISI PKB ini meninjau langsung lokasi yang direncanakan menjadi titik pembangunan jalan oleh Kementerian PUPR.

Lokasinya berada di Desa Paya Palas, Kecamatan Rantau Pereulak, Kabupaten Aceh Timur. Menurut Ruslan, anggaran pembangunan jalan tersebut rencananya diambil dari APBN.

Pembangunan infrastruktur jalan ini merupakan program pemerintah pusat

untuk pemerataan infrastruktur daerah, terutama di desa-desa tertinggal. Legislator dapil Aceh II ini, akhir Januari silam, juga meninjau jembatan rusak. Jembatan tersebut jadi akses bagi para siswa dan petani dalam beraktifitas.

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, jalan yang harusnya dibangun menggunakan APBD kini bisa menggunakan APBN, dengan syarat

jalan tersebut harus produktif," terang Ruslan.

Usai melihat langsung *infrastruktur* desa, ia berkomitmen segera menghadirkan keadilan untuk masyarakat desa di dapilnya. Butuh kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan akses infrastruktur yang memadai bagi warga desa setempat. "Insyaallah nanti kita bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menghadirkan keadilan," tandas mantan Bupati Bireuen itu. 



FOTO: IST/ANS

Anggota DPR RI Ruslan M. Daud, saat meninjau lokasi yang direncanakan menjadi titik pembangunan jalan oleh Kementerian PUPR.

Sartono Hutomo Serahkan Bantuan PJU Tenaga Surya



FOTO: IST/NR

Anggota DPR RI Sartono Hutomo, saat menyerahkan bantuan genset di Ponorogo.

Reses beberapa waktu lalu, Anggota Komisi VII DPR RI Sartono Hutomo menggelar kegiatan temu masyarakat di Dapilnya Jawa Timur VII.

A memulai perjalanannya di Kabupaten Magetan dengan menyerahkan bantuan kemasyarakatan berupa terop, kursi. Dan berlanjut ke Kecamatan Kartoharjo dan Kecamatan Karas, Sartono menyerap aspirasi kelangkaan pupuk, sumber pengairan petani, hingga kelangkaan LPG subsidi.

Kemudian, di hari berikutnya, politisi Partai Demokrat itu, menyapa ribuan masyarakat Kabupaten Ponorogo dengan memberikan bantuan program pelatihan UMKM sembari menyerahkan bantuan terop dan kursi sebagai program andalan.

Selama dua hari di Ponorogo, Sartono juga menyempatkan meninjau program pemasangan listrik gratis dan program penerangan jalan umum tenaga surya yang sudah di gelontorkan semenjak 2020 sampai tahun ini.

"Alhamdulillah dalam rangkaian kunjungan masyarakat mulai dari Magetan menyerahkan bantuan terop, listrik gratis, PJUTS. Kemudian kami di Ponorogo membuka pelatihan



Alhamdulillah dalam rangkaian kunjungan masyarakat mulai dari Magetan menyerahkan bantuan terop, listrik gratis, PJUTS.

Sartono Hutomo
Anggota Komisi VII DPR RI

bersama BRIN di beberapa lokasi hotel sambil bersilaturahmi dengan ribuan dulur-dulur relawan, masyarakat, dan beberapa tokoh didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo beserta jajaran fraksi," tambahnya.

rma/mh

Nevi Zuairina

Buka Perlombaan Futsal

Olahraga di daerah perlu terus dikembangkan, tidak saja melihat potensi atlet baru yang muncul tapi juga untuk kesehatan masyarakat. Anggota DPR RI Nevi Zuairina menunjukkan kepeduliannya soal ini, lewat perlombaan futsal.

PERTENGAHAN Februari lalu, di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, Nevi membuka langsung lomba futsal ini dengan tajuk Nevi Zuairina Cup ke-3 di Kecamatan Bonjol, Pasaman. Lomba futsal ini diinisiasinya sendiri sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan olahraga dan bakat muda di daerah. Nevi Zuairina Cup merupakan *event* tahunan yang dinanti oleh banyak peserta.

Dalam sambutannya, politisi PKS tersebut menyampaikan pentingnya kegiatan olahraga sebagai wahana memupuk kebersamaan, sportivitas, dan kesehatan. "Melalui Nevi Zuairina Cup ini, kita ingin menciptakan generasi muda yang tidak hanya unggul dalam prestasi akademik, tetapi juga dalam bidang olahraga, khususnya futsal," ujar Nevi.

Perlombaan ini diikuti lebih dari 20 tim futsal yang berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Pasaman.

Perlombaan ini tidak hanya mencari bakat baru di bidang futsal, tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat silaturahmi antarpemuda di Kabupaten Pasaman. Selain menyaksikan pertandingan, ia juga berinteraksi langsung dengan para pemain dan pelatih. Nevi menekankan pentingnya membangun karakter dan integritas di dalam maupun di luar lapangan.

Legislator dapil Sumbar II itu, kemudian memberikan bantuan perlengkapan olahraga kepada beberapa tim yang berpartisipasi. "Ini merupakan salah satu cara untuk mendukung dan memotivasi para pemuda agar terus aktif berolahraga. Saya berharap, kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah di setiap kabupaten kota di Sumatera Barat," tuturnya seperti dikutip dari fraksi.pks.id. 



FOTO: IST/WR

Anggota DPR RI Nevi Zuairina saat membuka langsung lomba futsal di Kecamatan Bonjol, Pasaman.

Achmad Hafisz Tohir

Soroti Pembangunan Desa

Desa kini harus menjadi pusat pembangunan, agar masyarakatnya kian berdaya dan tercerahkan. Tidak saja kesejahteraannya, tapi juga infrastruktur desa harus diperhatikan. Adalah Anggota DPR RI Achmad Hafisz Tohir yang memberi perhatian penuh pada pembangunan desa di saat berkunjung ke Desa Muara Merang, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, awal Februari 2024 silam



Anggota DPR RI Achmad Hafisz Tohir.

pendidikan adalah pondasi utama menciptakan generasi unggul dan berkualitas.

Selain itu, kesehatan masyarakat desa perlu mendapat perhatian serius. Politisi PAN itu bertekad, kesehatan masyarakat desa di dapilnya terus ditingkatkan. Akses

“

Setiap warga memiliki akses yang layak terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas

Achmad Hafisz Tohir.
Anggota DPR RI

DIKUTIP dari laman teropongsenayan.com, Hafisz berpendapat, membangun desa tidak boleh hanya slogan. Lebih dari itu, harus dengan komitmen nyata agar kualitas hidup warga desa terus meningkat. Hafisz memberi perhatian serius pada peningkatan infrastruktur jalan, pendidikan, dan kesehatan.

Ia berkomitmen menjadikan desa sebagai pusat pembangunan yang kokoh dan berkelanjutan.

Legislator dapil Sumsel I ini menyadari, pembangunan berkelanjutan membutuhkan perhatian terhadap infrastruktur jalan. Dia lalu mengupayakan perbaikan dan pengembangan akses jalan di dapilnya. Pada sektor pendidikan, Hafisz melihat,

layanan kesehatan yang mudah bagi warga desa harus terus diupayakan. “Setiap warga memiliki akses yang layak terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas,” ucapnya, singkat. Ia bahkan menyatakan dirinya sebagai sahabat dan pelayan masyarakat. Dengan kunjungan ini, ia berharap ada perubahan signifikan pada desa-desa di dapilnya sendiri. mh

Nurhayati Effendi

Sambangi Pasar Singaparna

Memantau pergerakan harga sembako jadi momen penting bagi Anggota DPR RI Nurhayati Effendi di Tasikmalaya. Dalam pantauannya, beberapa sembako mengalami kenaikan.



FOTO: IST/NR

Anggota DPR RI Nurhayati Effendi saat meninjau harga sembako di Pasar Singaparna, Tasikmalaya.

LELISLATOR Jabar XI ini menyambangi Pasar Singaparna pada awal Februari silam. Ia sengaja berkeliling pasar untuk mengetahui harga sembako yang menjadi kebutuhan warga. Menyikapi hal itu, Nurhayati meminta pemerintah segera mengambil langkah strategis menormalkan harga kebutuhan pokok.

"Pemerintah harus bisa mengontrol harga pangan. Lihat pasokannya, jangan sampai (pasokan) berkurang, sehingga (pemerintah) bisa mengantisipasi kenaikan harga. Kami harap, pemerintah bertindak cepat," ucap Nurhayati dalam siaran persnya. Sambil berkeliling Pasar Singaparna, Nurhayati juga mengimbau Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya merevitalisasi Pasar Singaparna menjadi pasar sehat.

Revitalisasi pasar penting, lanjut Anggota Komisi IX DPR ini, untuk menjaga kualitas kesehatan masyarakat. Apalagi, pasar merupakan salah satu tempat masyarakat mendapatkan pangan untuk konsumsi sehari-hari. "Pasar harus aman dari bakteri dan virus, sehingga apa pun yang dibeli di pasar itu sehat. (Pembangunan) pasar sehat harus segera direalisasikan," tutup politisi PPP ini. — mh

Billy Mambrasar

Putra Papua Pertama 'Penakluk' Harvard

Billy Mambrasar, atau Kakak Billy. Ya, itulah sapaan akrab sosok bernama lengkap Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, putra asli Papua yang sejak 2019 lalu menjabat sebagai salah satu dari 11 Staf Khusus Presiden RI Joko Widodo untuk periode kedua hingga 2024 tahun ini.

JAUH sebelum pencapaiannya, pemuda inspiratif kelahiran Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, 17 Desember 1988 ini, merupakan Pendiri Yayasan Kitong Bisa, yang bergerak dalam bidang pendidikan informal dengan menyediakan pendidikan untuk anak-anak kurang mampu dengan fokus di Papua dan Papua Barat.

Bukanlah tanpa alasan Kakak Billy mendirikan yayasan tersebut. Secara eksklusif saat diwawancara Parlementaria di bilangan Senen, Jakarta Pusat, awal Februari lalu, inisiatif tersebut muncul atas dasar latar belakang masa kecilnya yang hidup penuh dengan tantangan yang tidak mudah.

Jualan Kue

Billy hidup pada keluarga yang kala itu keadaannya cukup sulit. Ayah Billy merupakan seorang guru honorer, sedangkan ibunya seorang penjual kue. Dirinya sering membantu sang Ibu. Biasanya, Billy membawa kue-kue

buatan sang ibu ke sekolah untuk dijual. "Subuh Ibu bikin kue, paginya ibu pergi ke pasar untuk jualan. Kami ke sekolah sambil bawa kue untuk dijual," kenang Billy.

Dengan segala keterbatasan yang ada, tak membuat Kakak Billy menyerah dengan keadaan. Justru, Kakak Billy tetap menunjukkan api semangatnya dengan konsisten belajar, walau tidak ada listrik di rumahnya.

Prestasi Beasiswa

Perjuangan yang tak sia-sia mulai berbuah manis. Saat lulus SMP, Kakak Billy mendapatkan kesempatan emas berupa beasiswa dari Pemerintah Provinsi Papua untuk melanjutkan pendidikan SMA di Jayapura. Semua berkat prestasi kakak Billy yang termasuk lulusan terbaik di kotanya.

Saat lulus SMA, dirinya masuk 4 besar yang membuat Kakak Billy menjadi salah satu siswa terpilih yang difasilitasi untuk seleksi perguruan tinggi. Singkat cerita, ia



diterima di ITB dengan modal nekat. Ya modal nekat, karena ia masih terbentur kendala biaya.

Namun, tempaannya sejak kecil, membentuk Billy sebagai pribadi tangguh. Disamping orang tua yang rela mengetuk pintu door to door mencarikan biaya, Billy juga tak tinggal diam dengan berjualan kue, sebuah aktivitas lama yang sempat ditinggalkannya. Billy juga kerap bernyanyi di kafe demi menambah uang sakunya.

Billy melanjutkan pendidikan ke Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB. Biaya kuliah ditanggung oleh beasiswa afirmasi dan otonomi khusus dari Pemda. Lagi-lagi karena kerja kerasnya, ia meraih gelar sarjana S1.

Buah Kerja Keras

Lulus kuliah, dia membuktikan hasil kegigihannya dengan diterima bekerja menjadi insinyur di perusahaan minyak asal Inggris. "Benar kata orang tua saya, pendidikan bisa mengangkat derajat kita dari kemiskinan. Terbukti, setelah lulus, saya bisa mengangkat ekonomi orang tua saya. Saya membangun rumah orang tua, saya benar-benar fokus membahagiakan orang tua serta menyekolahkan adik-adik," tuturnya.

Istimewanya, dengan gaji tinggi dan kemewahan fasilitas pekerjaan tak membuatnya terlena. Kesusahaan



FOTO: IST/ANS

Gracia Josaphat Jobel Mambrasar, Staf Khusus Presiden RI Joko Widodo.

yang dialaminya semenjak masa kecil membuat Billy peka.

Yayasan Kitong Bisa

Ia rela meninggalkan segala kenyamanannya, karena ingin bermanfaat bagi bangsa dan negara yang sangat dicintainya, Indonesia. Pada 2009, sejarah tercipta, Billy mendirikan yayasan untuk membantu anak-anak Papua kurang mampu yang dinamainya 'Kitong Bisa'.

Di awal berdirinya, Kitong Bisa memiliki 9 pusat belajar, 158 relawan, dan 1.100 siswa. Sebanyak 20

anak didiknya berhasil menempuh pendidikan tinggi di kampus ternama dunia. Semua karena Billy ingin agar anak-anak Papua lainnya memiliki pendidikan dengan kompetensi yang menjadikan anak Papua berdaya saing maksimal tidak hanya di level nasional melainkan juga mancanegara.

Billy juga menyabet gelar Master of Business Administration (MBA) dari The Australian National University (2013-2014). Dia juga menyabet gelar Master of Science (MSc) dengan tesis keberlanjutan sosial dalam proyek LNG.

Billy juga merupakan Direktur PT Papua Muda Inspiratif. Dirinya juga menjadi Duta Pembangunan Berkelanjutan Indonesia. Saat Presiden Jokowi meresmikan Papuan Youth Creative Hub, di Jayapura. Billy mempresentasikan rencana strategis dari Pusat Pengembangan Papua.

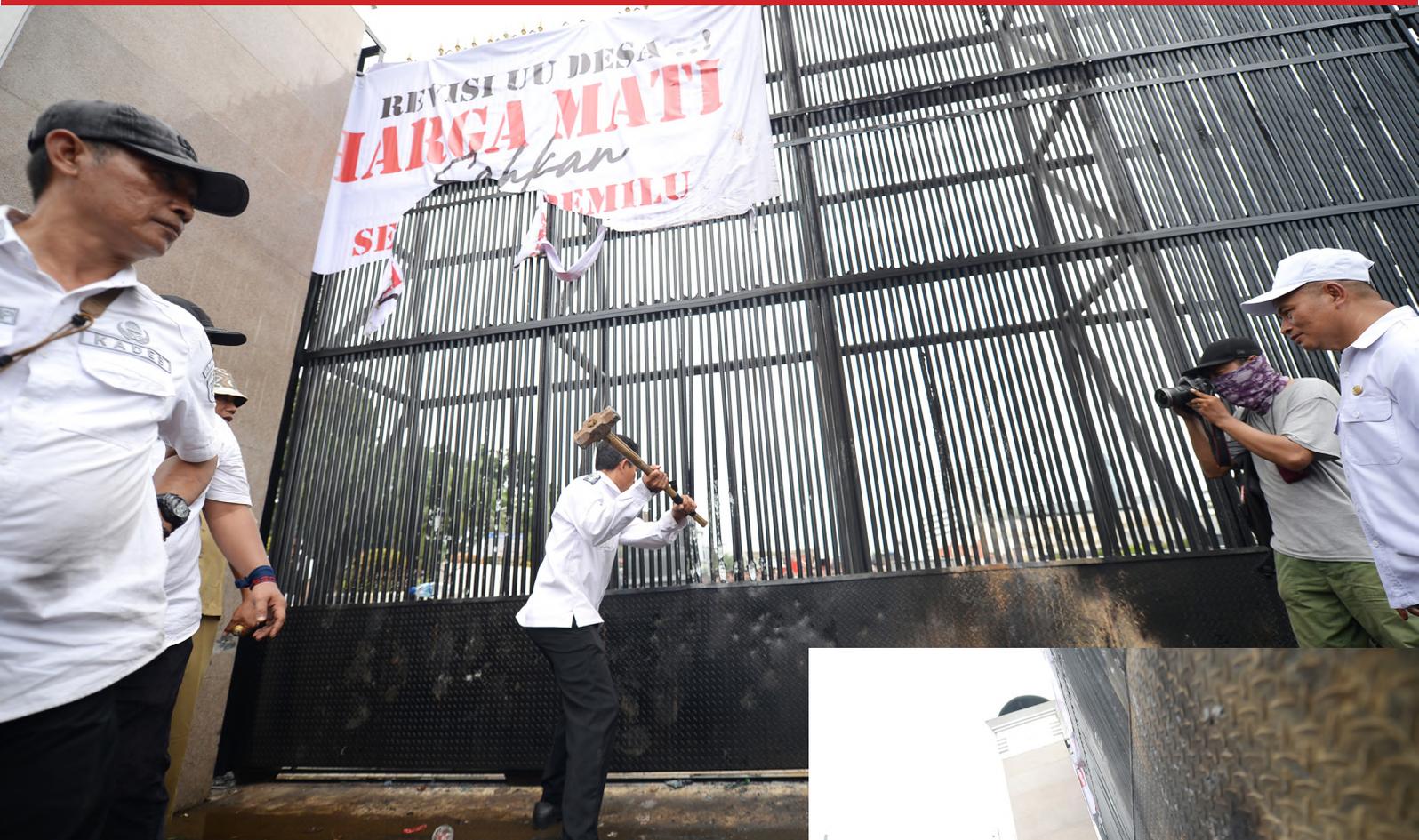
Seluruh pencapaian prestasi gemilangnya rupanya terdengar sampai meja Presiden. Sederet prestasinya menghantarkan Billy meraih posisi yang sangat membanggakan yakni ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Staf Khusus Presiden untuk membangun Indonesia dari Papua. 

“

Benar kata orang tua saya, pendidikan bisa mengangkat derajat kita dari kemiskinan. Terbukti, setelah lulus, saya bisa mengangkat ekonomi orang tua saya. Saya membangun rumah orang tua, saya benar-benar fokus membahagiakan orang tua serta menyekolahkan adik-adik

Gracia Josaphat Jobel Mambrasar,
Staf Khusus Presiden RI Joko Widodo

Ketika Palu Godam Hujam Pagar Parlemen



“Dum, dum, dum ...”

Dentuman keras terdengar dari bagian depan tembok kompleks parlemen. Suara itu berasal dari hantaman palu godam yang diayunkan ke tembok pagar di depan Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta.



HANTAMAN palu diiringi teriakan dukungan dari para pengunjung rasa. Massa dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang berunjuk rasa saat itu sebagian besar datang mengenakan pakaian aparat desa berwarna coklat muda.

Dengan berpakaian necis, pengunjung rasa sudah mengerumuni depan halaman DPR RI sejak pukul 7 pagi. Puluhan bus berpendingin udara, non ekonomi, mengantarkan para pengunjung rasa tersebut. Jumlah peserta aksi ratusan orang datang dari sejumlah desa di Jawa. Tujuannya menuntut pengesahan revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Muncul pertanyaan darimana datangnya palu godam tersebut? Pihak kepolisian punya jawabannya, benda penetak itu telah dipersiapkan sebelum aksi dimulai. "Hari ini teman-teman melihat ada aksi penyampaian pendapat di DPR yang sedikit diwarnai pengrusakan sebagian kecil dari pagar DPR luar, dan kita tahu mereka sudah mempersiapkan," kata Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto kepada wartawan di sela-sela pengamanan unjuk rasa.

Seorang pendemo yang berpakaian perangkat desa menggedor dengan palu godam, merusak tembok.

cekungan telah terbentuk di tembok setebal lebih dari 50 cm itu. Setelah merusak pagar tersebut, perangkat desa dengan bandana itu terlihat tersenyum. Temannya mengambil alih palu dan bergantian menggodam tembok pagar.

Massa lainnya juga sempat mencoba merobohkan pagar besi DPR RI dengan tali tambang. Namun, gagal setelah seorang polisi memotong tali tambang tersebut. "Ya, pasti kita punya dokumentasi, tetapi pelan-pelan ya. Pamong praja secara politik dia adalah pemimpin yang paling dasar di wilayah seluruh Republik Indonesia. Jangan memperlihatkan perilaku-perilaku seperti itu," lanjut Kapolda Metro Jaya.

Legislator Terima Pendemo

Rencana revisi UU Desa melatarbelakangi aksi demo ini. Meski suasana memanas di depan gerbang, perwakilan parlemen tetap menerima audiensi massa pendemo. Dua Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Santoso dan Luluk Nur Hamidah menerima perwakilan demonstran dari Apdesi di ruang rapat Pansus, Nusantara II.

Keduanya senada ingin memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan Apdesi. Dalam forum tersebut, Santoso menjelaskan tahapan dalam penyusunan UU. Melihat kondisi tersebut, dia akan memperjuangkan agar dalam pembahasan revisi UU Desa ada



Pada bagian lain Irjen Karyoto menyebut massa sengaja membawa ban bekas. Temuan polisi di lapangan, massa sudah mempersiapkan 30 ban bekas untuk dibakar di depan Gedung DPR. "Anggota kami sudah razia. Kami dapatkan banyak sekali, lebih dari 30 (ban bekas). Karena kalau ban dibakar 30 biji bisa dibayangkan asap hitam seolah-olah nanti membuat kekacauan," jelasnya.

diskresi. Dalam audiensi ini hadir para perwakilan pengurus termasuk Ketua Umum Apdesi.

"Saya melihat kondisi ini harus ada diskresi, ada perlakuan khusus, kami akan perjuangkan. Jadi saya akan perjuangkan adanya diskresi yang menjadi tuntutan para kepala desa. Jadi apakah waktunya tepat atau terlambat, tetap akan memprioritaskan apa yang menjadi aspirasi kepala desa," papar Santoso disambut tepuk tangan para perwakilan demonstran. **ssb,aha/mh**





Oleh:
dr. M Yusuf Ramadhan
Fakultas Kedokteran
Universitas Hasanuddin

PADA musim hujan potensi merebaknya beberapa penyakit seperti demam berdarah (DBD), gatal-gatal, dan flu akan sering terjadi. Namun, masih ada salah satu penyakit penyerta banjir yang jarang diketahui dan perlu diwaspadai oleh masyarakat, yakni penyakit leptospirosis.

Leptospirosis adalah penyakit yang terjadi karena infeksi bakteri leptospira interrogans. Leptospirosis adalah penyakit zoonosis. Artinya, penularan leptospirosis dapat terjadi dari hewan ke manusia. Di Indonesia, tikus adalah sumber utama penularan penyakit leptospirosis. Namun, penyakit ini juga bisa ditularkan binatang lain seperti anjing, babi, sapi, dan kambing.

Indonesia merupakan negara beriklim tropis dan memiliki karakteristik curah hujan yang tinggi saat musim penghujan. Hal ini kian erat hubungannya dengan kasus leptospirosis yang cenderung

Cegah Leptospirosis Saat Banjir

Memasuki musim penghujan diperlukan persiapan menghadapi bencana banjir, terkhusus masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir. Hal ini dilakukan agar terhindar dari beberapa dampak buruk datangnya banjir, salah satunya adalah kemungkinan terserang penyakit penyerta banjir.

meningkat setiap tahunnya. Menurut data Kementerian Kesehatan, pada 2021, terdapat 736 kasus leptospirosis dengan angka kematian sebanyak 84 jiwa, dan pada 2022 berdasarkan laporan dari 11 provinsi terdapat 1.408 kasus leptospirosis dengan angka kematian 139 jiwa.

Angka kenaikan setiap tahun ini menjadi tanda bahwa penyakit ini belum terlalu dipahami oleh masyarakat, sehingga masih diperlukan sosialisasi khususnya pada daerah yang rawan bencana banjir agar masyarakat mengetahui cara penularan, gejala dan cara pencegahan dari penyakit leptospirosis.

Cara Penularan Leptospirosis

1. Kontak langsung antara kulit dengan urin hewan pembawa bakteri leptospira.
2. Kontak antara kulit dengan air dan tanah yang terkontaminasi urin hewan pembawa bakteri leptospira.
3. Mengonsumsi makanan yang terkontaminasi urin hewan pembawa bakteri penyebab leptospirosis.

Bakteri leptospira dapat masuk ke dalam tubuh melalui luka terbuka, baik luka kecil seperti luka lecet, maupun luka besar seperti luka robek, juga bisa masuk melalui mata, hidung, mulut, dan saluran pencernaan.

Pada musim penghujan diperlukan kewaspadaan untuk mencegah penyakit ini karena akan banyak genangan air di sekitar lingkungan padat penduduk yang tidak memiliki sistem saluran air yang baik. Hal tersebut menjadi tempat sumber penularan leptospirosis.

Bakteri leptospira dapat masuk ke dalam tubuh melalui luka terbuka, baik luka kecil seperti luka lecet, maupun luka besar seperti luka robek, juga bisa masuk melalui mata, hidung, mulut, dan saluran pencernaan.



Faktor Risiko Penularan Leptospirosis

1. Bertempat tinggal atau beraktivitas di wilayah banjir, wilayah pemukiman yang banyak tikus, tempat beraktivitas di sungai, dan tempat olahraga air.
2. Risiko pekerjaan seperti petani, peternak, petugas kebersihan, petugas pemotongan hewan, tentara, dan lain-lain.

Gejala Leptospirosis

Berikut ini adalah gejala penyakit leptospirosis yang dapat dirasakan oleh pasien yang terjangkit, diantaranya

1. Demam mendadak
2. Lemah
3. Mata merah
4. Kekuningan pada kulit
5. Sakit kepala

6. Nyeri otot betis

Bila didapati beberapa gejala di atas yang sebelumnya ada kontak dengan daerah ditemukan populasi tikus, maka segeralah ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan dan pertolongan dari tenaga medis.

Pencegahan Penyakit Leptospirosis

Setelah mengetahui berbagai gejala yang ditimbulkan apabila pasien terpapar bakteri leptospirosis, mengetahui tindakan pencegahan juga merupakan hal yang penting untuk diketahui, diantaranya:

1. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
2. Mencuci tangan dengan sabun sebelum dan setelah selesai beraktivitas.

3. Menggunakan alat pelindung diri seperti, sarung tangan dan sepatu boots saat membersihkan rumah/ selokan.

4. Tidak membuang sampah di sembarang tempat dan menanam pohon untuk mencegah banjir.

5. Melakukan pemberantasan sarang tikus pada lingkungan padat penduduk.

6. Segera mengunjungi puskesmas/ rumah sakit bila mengalami gejala leptospirosis sebelum terjadi komplikasi serius karena penyakit ini dapat menyebabkan kerusakan hati, kerusakan ginjal, dan meningitis.

Dengan mengetahui berbagai hal mengenai penyakit ini, diharapkan masyarakat dapat bersiap dan lebih berhati-hati terhadap penyakit leptospirosis yang merupakan salah satu penyakit penyerta banjir. 🐭

Trip Pendek di Surabaya



Ragam pilihan untuk menjelajahi Kota Surabaya. Kota metropolitan terbesar di Indonesia setelah Jakarta ini tak hanya kaya dengan sejarah dan bangunan ikonik, namun juga petualangan kuliner yang menjanjikan.

HARI telah sore dan matahari sudah tidak begitu terik. Suhu kota Surabaya terkenal dengan panas, khas kota pesisir lainnya. Sehingga, keputusan untuk trip pendek di beberapa titik di kota ini di sore hari tidaklah buruk.

Kedung Cowek

Tujuan pertama saya ialah Benteng Kedung Cowek yang berada di bibir pantai kota ini menghadap Pulau Madura. Dengan pemandangan laut dan Jembatan Suramadu, terdapat aktivitas melaut dan keramaian kaki lima di sekitarnya. Destinasi wisata lokal yang selalu ramai dikunjungi masyarakat.

Terlepas dari sejarahnya, berdiri di awal abad 20 masehi, benteng buatan Kolonial Belanda ini berkompleks sangat besar dan konon pengadaan meriamnya memakan dana hampir 5 juta gulden. Dengan instalasi pertahanan itu, Surabaya jelas bandar paling penting dan megah di sisi timur Nusantara.

Kedatangan kali ini saya ingin melihat bagaimana lokasi yang diterpa angin laut ini jadi tempat para pelancong dari dan mau ke Madura melepas penat. Tak sedikit pula jadi tujuan muda-mudi bercengkrama, nongkrong atau kencan. Apalagi bangunan benteng, yang sebagian terpendam abrasi tanah, juga estetik. Tak sedikit pula orang-orang menjadikannya latar belakang foto *pre-wedding*.



Sate Klopo

Puas mengitari benteng dan melihat bayangan Pulau Madura di seberangnya, perut saya keroncongan. Matahari sudah terbenam dan waktunya makan malam. Saya bergegas menuju tengah kota, tujuannya 'Sate Klopo Ondomohen Ibu Asih'.

Lokasinya dekat dengan Balai Kota Surabaya, tidak sulit menemukannya. Warung sate ini telah jadi legenda baik bagi warga lokal maupun pelancong dari luar kota. Buka dari pagi hingga



tutup sampai pukul 22.00 WIB, sate ini menyediakan daging sapi dan ayam dengan balutan parutan kelapa. Potongannya cukup besar, jadi saya pastikan yang memakannya tidak akan merasa rugi dengan porsi yang disajikan.

Setelah dipanggang di bara api, sate mendapat lumuran kuah kacang dan sambal. Saya pun meminta tambahan sepiring nasi, biar komplit rasa kenyangnya. Daging sate sangat lembut meskipun ukurannya cukup besar. Sementara parutan kelapa yang menempel cocok dimakan dengan kuah kacang yang rasanya seimbang.

Museum Pendidikan Surabaya

Semakin lama saya berada di warung sate ini, semakin ramai pula pengunjung baik yang ingin bungkus atau makan di tempat. Saya pun memutuskan

untuk pindah lokasi ke titik selanjutnya, Museum Pendidikan Surabaya.

Gedung museum terbilang baru direnovasi. Berdiri di bekas bangunan Sekolah Taman Siswa, museum buka sampai malam dengan cafe yang beroperasi. Terletak di tengah kota samping Jembatan Genteng Kali, pemandangan yang disajikan lokasi ini ialah hingar bingar Kota Surabaya kala malam.

Museum juga berdiri disamping kali yang mirip dengan lokasi Taman Prestasi Surabaya yang juga terletak di pinggir sungai. Terdapat atraksi perahu untuk mengarungi sungai, hanya saja transportasi air itu beroperasi hingga sore.

Tahu Campur

Setelah melihat-lihat museum, saya pulang ke penginapan saya yang

terletak tak jauh dari Gedung Juang 45. Sesampainya di sana, saya melihat tenda warung Tahu Campur digelar. Namanya 'Tahu Campur Pak Sadak', saya tergoda untuk menjajal menu khas Surabaya ini.

Antreannya mengular, sehingga harus mengambil nomor. Setelahnya baru bisa memesan. Dari banyaknya peminat, saya merasa mantap Tahu Campur yang diujakan sudah teruji nikmatnya di lidah para warga Surabaya.

Tahu Campur adalah kuliner unik bagi saya sebagai orang minang. Bayangkan potongan otot, dimana saya menyebutnya tunjang, ditemani potongan tahu, selada dan semacam perkedel singkong. Dengan harmonis, semua bahan itu disiram kuah kaldu daging yang bercita rasa manis-gurih.

Saya yang terbiasa memakan tunjang dengan olahan gulai dibikin takjub. Rasanya yang enak tetap membuat saya penasaran untuk terus melahapnya. Rupanya malam ini saya menutup perjalanan dengan makan yang menerbitkan selera, rasanya tak salah pilih. **aha/mh**

Puan Maharani Menikmati Alam dengan Trekking

Ketua DPR RI Puan Maharani saat trekking di Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Foto: Ist/nr

Menyusuri rute menantang dan menikmati indahnya alam jadi hobi tersendiri bagi Ketua DPR RI Puan Maharani. Pengalaman menyenangkan ini, ia rekam di media sosial sambil berolahraga luar ruang.

PUAN begitu menikmati aktivitas *outdoor* ini. "Kanan, kiri, belakang, depan hijau semua. *Fresh banget*," ucapnya. Ketua DPP PDI Perjuangan itu melakukan trekking dengan menyusuri Sungai Citarik, Palabuhanratu, Sukabumi. Dia menempuh jarak sekitar 5 kilometer. Tiga minggu kemudian, Puan menjajal trekking di Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Dia memulai dari gerbang Plunyon Kalikuning, melewati jembatan, dan berakhir di Kali Kuning Park.

Trekking itu sangat seru, karena ia bisa bermain air di Umbul Lanang,

mata air abadi di lereng Merapi. Selain itu, konon membasuh muka di tempat tersebut akan membawa banyak kebaikan.

"Alhamdulillah memang benar rasanya langsung *fresh*, apalagi setelah jalan kaki yang rutinya naik-turun. Selalu jatuh cinta setiap beraktivitas *outdoor* seperti ini. Badan sehat berkeringat, pikiran segar, dan juga sekalian cuci mata karena dikelilingi *landscape* yang alami hijau semua," ujar mantan Menteri PMK ini.

Legislator dapil Jateng V ini, dalam unggahan Instagram lainnya, terlihat tidak trekking sendirian, melainkan ditemani banyak staf yang senantiasa

siap mendampingi ketika menjelajah alam bebas. Ia pun mengajak berolahraga dalam kontennya, sembari merayakan Hari Olahraga Nasional.

"Siapa musuh kita kalau berolahraga? Ya diri sendiri. Mengalahkan rasa malas berolahraga itu termasuk salah satu prestasi lho. Setiap ada waktu pasti saya sempatkan berolahraga, bahkan sering di sela kunjungan kerja. Kadang trekking, kadang gowes, jalan kaki, sempat juga *rafting*. Apapun olahraga favoritmu, tetap bergerak, tetap semangat yaa!" ucapnya di media sosial, sambil mengucapkan, "Selamat Hari Olahraga Nasional 2023." 

Sajak Pemilu



*Cape-capek tunggu pemilu,
Tapi engga bebas,
Rugi dong,
Yang benar saja.*

Sajak di atas menjadi kalimat pamungkas jelang penutupan pidato paripurna pada awal Februari lalu. Oleh Puan Maharani, Ketua DPR RI ini melanjutkan sajaknya.

*Capek-capek ke TPS dan nyoblos,
Tapi engga ikut kata hatinya,
Rugi dong,
Yang benar saja.*

Alhasil, seluruh anggota dewan yang mengikuti rapat bertepuk tangan riuh. Puan mengajak seluruh rakyat Indonesia berpartisipasi aktif dalam pesta demokrasi yang diselenggarakan pada 14 Februari 2024. Pasalnya, Pemilu 2024 tersebut menurutnya menentukan nasib bangsa Indonesia selama lima tahun mendatang.

"Bagi rakyat, yang terpenting dalam pemilu adalah menentukan hidupnya menjadi lebih sejahtera; hidup yang lebih mudah; hidup yang lebih nyaman," tutur Puan saat membacakan pidato pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Februari lalu.

Terlepas dari perbedaan pendapat dan persepsi, politisi Fraksi PDI Perjuangan itu mengingatkan agar persatuan dan kesatuan menjadi prioritas utama. Tanpa nilai ini, ucapannya, akan sulit mencerdaskan kehidupan bangsa dalam konteks pemilu.

"Marilah, rakyat Indonesia gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya, untuk Indonesia yang sentosa yang kita cintai bersama," pungkas cucu Proklamator ini.  hal/mh



SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR RI
SERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
Selamat Memperingati

Isra Mi'raj



27 RAJAB 1445 H



DPR RI



DPR RI



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri